The 145th/146th Sessions of the World Customs Organization's (WCO) Council

KERTAS POSISI

DELEGASI INDONESIA

SIMPANLAH DOKUMEN RAHASIA INI SEBELUM SAUDARA MENINGGALKAN RUANGAN

KELALAIAN SAUDARA BERAKIBAT KERUGIAN BAGI NEGARA

Hybrid Meeting

Brussels, belgia
26-28 June 2025

GENERAL INFORMATION
OF 145th/146th COUNCIL SESSIONS

Day/Date	TIME (Brussels Time)	ITEM	PROGRAM
Day 1 Thursday, 26 June 2025	08.30 - 09.30	REGISTRATIONS AND COLLECTION OF BADGES	
	09.30 - 11.00	1	• Adoption of the Agenda • Programme of work
		2	Comments by the Chairperson of the Council
	11.00 - 11.30	NETWORKING COFFEE BREAK	
	11.30 - 12.00	3	Report of the Secretary General
		Regional Consultations	
	12.15 - 13.30	-	Far East, South and SouthEast Asia, Australasia and the Pacific Islands (Room A/B)
		-	East and Southern Africa (Room CD)
		-	West and Central Africa (Johannesburg)
	13.30 - 14.45	-	Europe (Room A/B)
		-	South America, North America, Central America and the Caribbean (Room CD)
	13.00 - 15.00	BUSINESS LUNCH	
	15.00 - 15.15	4	Technical matters – Approval of written reports:
		(a)	Capacity Building
		(b)	Tariff and Trade Affairs:
		(i)	Rules of Origin
		(ii)	Valuation
		(iii)	Nomenclature and Classification
		(c)	Compliance and Facilitation
		(i)	Compliance/Enforcement
		(ii)	Facilitation/Procedures
	15.15 - 16.30		PANEL I – Mind the Gap! How can Customs work with tax authorities to value goods affected by transfer pricing?
	16.30 – 17.30	5	Policy matters:
		-	"A" Items

Day/Date	TIME (Brussels Time)	ITEM	PROGRAM
			(Issues for information, progress reports for noting or issues unanimously agreed by Working Groups and Committees for endorsement)
		-	SAFE Framework of Standards - Progress Report
		-	WCO Fragile Borders Action Plan – Progress Report
		-	WCO Secretariat Gender Equality and Diversity Work Plan - Progress Report
		-	Report of the Integrity Sub-Committee – A refreshed mandate
			"B" Items Issues requiring discussion, orientation or guidance
		-	e-Commerce
		-	Strategic discussion on the Private Sector Consultative Group
	17.30 - 18.00		Meeting of Heads of Delegation
	18.00 - 19.30		NETWORKING DRINKS
Day 2 Friday 27 June 2025	09.30 - 11.00	5	Policy matters (continued):
		-	Project Proposal – Enhancing the Harmonized System (HS) framework
		-	Declaration of the Customs Co-operation Council on Green Customs (the Baku Declaration) - Proposal from Azerbaijan
		-	Future of the Data and Statistics Working Group
	11.00 - 11.45	HEADS OF DELEGATION PHOTO AND NETWORKING COFFEE BREAK	
	11.45 - 13.00		PANEL II – Data-driven appoaches to e-commerce in Customs
	13.00 - 15.00		BUSINESS LUNCH
			MEMBERS ONLY SESSIONS
	15.00 - 16.15		PANEL III – Delivering impact i Capacity Building: A shared responsibility under the new Paradigm
	16.15 - 16.45		NETWORKING COFFEE BREAK
	16.45 - 18.00	6.	Governance matters
		-	Report of the 19th Meeting of the Audit Committee
		-	WCO Modernization Implementation – Progress Report
		-	WCO Strategic Plan 2025 - 2028

Day/Date	TIME (Brussels Time)	ITEM	PROGRAM
Day 3 Saturday 28 June 2025	09.00 – 09.30	Signing ceremonies and depositing of instruments (jika ada kesepakatan dengan negara lain atau bilateral meeting)	
	09.30 - 10.30	6	Governance matters (continued)
		-	Implementation Plan 2025 - 2026
		-	Update to the format of the Council and preliminary research on electronic voting systems
		-	European Union Concept Notes on WCO Regional Reform and WCO Sustainable Financing
	10.30 – 11.30	7	Budgetary and Financial matters
		-	110 th Session of Finance Committee
	11.30 - 12.00	NETWORKING COFFEE BREAK	
	12.00 - 14.30	9	Elections: (1) Chairperson of the Council (2) Vice-Chairpersons of the Council (3) Members of the Policy Commission (4) Members of the Finance Committee (5) Chairperson and Vice-Chairperson of the Finance Committee (6) Members of the Audit Committee (7) Chairperson and Vice-Chairperson of the Audit Committee
		8	Other business: ● Presentation to winner of photo competition
		10	Date and place of next sessions of the Council and Calendar for Committee sessions and other meetings (1 July 2025 - 30 June 2026)
			Closing remarks

LINK DOCUMENT

https://linktr.ee/PolicyCommision_CouncilSession

THE 145th/146th SESSIONS OF THE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL

Hybrid Meeting
26-28 June 2025

PROVISIONAL ANNOTATED AGENDA

AGENDA ITEM 1: ADOPTION OF THE AGENDA
PROGRAMME OF WORK
Council Chairperson akan memberikan pengarahan tentang rancangan agenda, dan mengundang delegasi untuk memberikan masukan sebelum diadopsinya agenda dan program kerja.

< Chairperson of the Council to lead >

Keterangan:
- Chairperson akan meminta masukan dari peserta pertemuan apakah agenda dapat disepakati.
- Negara Anggota diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan intervensi apabila ada usulan perubahan agenda.
- Apabila ada masukan, Chairperson perlu menanyakan kepada Negara Anggota lain apakah perubahan agenda dapat disetujui.
- Jika perubahan agenda disetujui oleh Negara Anggota ataupun tidak ada perubahan yang diajukan, maka agenda akan diadopsi.

Docs:
Draft Agenda (SC0237e)
Programme of Work (SC0238e)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):
Indonesia menyetujui adopsi agenda *Council Sessions*.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):
Indonesia would like to express our highest appreciation to the Council Chairperson, the Secretary General, and the WCO Secretariat to make this Council session possible. Indonesia supports the agenda of adoption.

AGENDA ITEM 2: COMMENTS BY THE CHAIRPERSON OF THE COUNCIL
Council akan diundang untuk mencatat komentar yang disampaikan oleh Council Chairperson, Mr. Edward Kieswetter (South Africa).

< Chairperson of the Council to lead >

Keterangan:
- Sambutan sekaligus arahan Mr. Edward Kieswetter selaku Chairperson.

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):
Indonesia *take note* atas *comments* dari *Council Chairperson*.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):
Take note

AGENDA ITEM 3: REPORT OF THE SECRETARY GENERAL

Sekretaris Jenderal akan menyampaikan *update* mengenai perkembangan terbaru, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat untuk melaksanakan Rencana Strategis pada tahun 2024/2025 sebagaimana diuraikan dalam Laporan. *Council* akan diundang untuk mencatat perkembangan dan Laporan tersebut.

<Secretary General>

Keterangan:

1. Sebagai Laporan *WCO Strategic Plan,* Dokumen SP0880Ea menyajikan tinjauan atas pelaksanaan Rencana Strategis untuk tahun anggaran 2024/2025. Laporan terdiri dari tiga bagian utama yaitu:
   a. Status *progress*/kemajuan yaitu laporan sejauh mana Rencana Implementasi 2024–2025 telah dijalankan, termasuk visualisasi berupa grafik dan informasi ringkas terkait pencapaian yang telah diraih hingga saat ini;
   b. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan tingkat kemajuan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis; dan
   c. Laporan implementasi secara rinci, yang memuat informasi lengkap mengenai status masing-masing keluaran (deliverables) yang tercantum dalam Rencana Implementasi 2024–2025.
2. Berdasarkan hasil pemantauan hingga akhir Juni 2025, sebanyak 74% dari total hasil kerja (*deliverables*) telah berhasil diselesaikan. Sementara itu, 20% lainnya masih dalam tahap penyelesaian pada berbagai bagian dari Rencana Strategis. Terdapat tiga hasil kerja (*deliverables*) yang mengalami penundaan atau belum dimulai, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan pendanaan.

***The Council* diundang untuk**

mencermati dan mencatat perkembangan yang telah berlangsung serta isi laporan yang disampaikan.

Docs:
SP0880Ea
SG0234
SG0235

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

Indonesia menyetujui laporan Sekretaris Jenderal WCO.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Thank you, Mr. Secretary General for the comprehensive report. Indonesia fully supports the forthcoming endeavors of the WCO, specifically in advancing the fulfillment of the three Focus Areas in the WCO Strategic Plan 2022-2025: Technology and Innovation, Green Customs, and Governance and accountability. Thank you Chair.

REGIONAL CONSULTATION

Far East, South and South East Asia, Australasia and the Pacific Islands (Room A/B)

< Vice-chair Asia Pacific to lead >

Keterangan:

Agenda konsultasi regional meliputi:

1. Welcome and Introduction
2. Outcomes of the 26thRegional Heads of Customs Administrations (RHCA) Conference

   Vice-chairperson akan melaporkan kesepakatan hasil pertemuan RHCA ke-26 yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-22 Mei 2025
3. Discussion of Expressions of Interest for WCO Vice-Chairperson for the A/P Region (2026-2028)

   Pada pertemuan RHCA ke-26, belum ada Negara Anggota yang mengajukan nominasi menjadi Vice-chair Asia Pasifik periode 2026-2028. Selanjutnya, diputuskan untuk memperpanjang periode pengumpulan Expression of Interest. Dalam pertemuan Caucus tanggal 12 Juni 2025, Hong Kong Customs selaku Vice-chair incumbent menginformasikan bahwa ada indikasi 1 Member yang berminat menjadi Vice-chair dan sedang melakukan finalisasi internal. Nominasi final akan diinformasikan pada pertemuan Council dalam agenda Regional Consultation.
4. Updates on ValidAP

   Tentang ValidAP:

   - ValidAP adalah platform berbasis blockchain yang dikembangkan oleh WCO A/P. Platform ini bertujuan untuk mengatasi inefisiensi dan kerentanan dalam sistem validasi dokumen yang masih menggunakan kertas secara tradisional;
   - Manfaat: Platform ini menyederhanakan berbagi data tanpa mengungkap isi dokumen, mudah diimplementasikan, dan menyediakan statistik KPI melalui dasbor. Koneksi antar sistem dapat dilakukan melalui API sederhana.
   - Dokumen pendukung Briefsheet ValidAP: ***https://drive.google.com/ValidAPBriefsheet***

   Keamanan data dan dokumen:

   - ValidAP ini menggunakan blockchain dan kriptografi untuk menjamin keamanan dan integritas data tanpa menyimpan atau mentransmisikan konten dokumen, sehingga meminimalkan risiko kebocoran dan isu hukum.
   - Platform ini menjaga integritas dan pengawasan dalam proses validasi dokumen karena dilengkapi dengan hierarki akun pengguna dan alur persetujuan.

   Timeline implementasi

   - Proyek Percontohan: ValidAP sedang diuji untuk berbagai jenis dokumen, termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas, Sertifikat Asal, dan sertifikat kesehatan, dengan tujuan untuk integrasi regional dokumen perdagangan.
   - Potensi Masa Depan: ValidAP dapat mendukung integrasi dengan inisiatif yang lebih luas seperti ASEAN dan Belt-and-Road, serta memiliki prospek untuk kebijakan global dan kolaborasi blockchain antar negara anggota.
   - Rencana Implementasi: Sistem ini didukung oleh Administrasi Pabean Hong Kong, dengan akun gratis untuk anggota serta koneksi API. Pengembangan sistem percontohan direncanakan, dengan pengujian beta pada Maret 2025 dan pengesahan resmi pada Mei 2025.

   Aspek Pembiayaan:

   - Biaya pengembangan dan implementasi sistem: Seluruh biaya pengembangan dan implementasi sistem ValidAP ditanggung Bea Cukai Hong Kong, sehingga Anggota A/P dapat bergabung tanpa biaya.
   - Biaya lainnya dibebankan kepada masing-masing anggota: dalam hal koneksi API antar sistem dengan ValidAP memerlukan peningkatan sistem internal di pihak Anggota, biaya tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing.

   Pembahasan terkait ValidAP

   - ValidAP telah beberapa kali dikenalkan dan dibahas dalam pertemuan, sebagai berikut:

WCO Asia Pacific Regional Contact Point Meeting ke-24 (Oktober 2024)	Pengenalan ValidAP pertama kali oleh APVC Secretariat	DJBC dan beberapa Administrasi lain mengusulkan adanya pertemuan membahas teknis ValidAP
Technical meeting ValidAP pada 17 Maret 2025	Pemaparan spesifikasi teknis dan arsitektur sistem ValidAP, oleh APVC Secretariat dan pengembang sistem	DJBC hadir diwakili tim Dit. IKC dan Dit KSIKC. Beberapa concern teknis disampaikan beberapa anggota, seperti: - isu perlindungan data; - proses bisnis integrasi sistem verifikasi dengan otoritas dan pemangku kepentingan swasta, verifikasi dokumen khusus (misalnya ATA Carnet); - manfaat ValidAP bagi sistem nasional yang sudah memiliki validasi internal; dan, - kebutuhan pelatihan teknis dengan demonstrasi use case yang komprehensif (yang akan diberikan bagi interested members).
Pertemuan RHCA Ke-26, Mei 2025 di Hong Kong China	Pemaparan konsep, fungsi, dan demo ValidAP oleh APVC	Beberapa hal yang disampaikan DJBC: - Usulan permintaan technical meeting lanjutan untuk memberikan gambaran teknis yang lebih menyeluruh
WCO Council Sessions 145/146 - pada agenda Regional Consultation (26 Juni 2025)	Paparan *updates on ValidAP,* oleh APVC	Posisi DJBC: - mencatat paparan APVC - DJBC dapat mempertimbangkan menyampaikan terkait klarifikasi keberlanjutan proyek, mengingat ValidAP merupakan inisiasi Hong Kong Customs dalam peran sebagai Vice Chair dengan masa jabatan 2024-2026

Posisi Rencana Adopsi ValidAP oleh DJBC:

- Pada prinsipnya DJBC menyambut baik terhadap segala inisiatif dalam bidang TIK serta penggunaan teknologi terkini dalam upaya mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan barang lintas negara.
- Terkait adopsi ValidAP, DJBC akan terlebih dahulu melakukan persiapan yang matang sebelum bergabung dengan project tersebut, dengan mempertimbangkan:
  - Bahwa fungsi yang didapatkan dengan bergabung pada platform ValidAP serupa dengan fungsi penyimpanan dokumen digital dengan fitur verifikasi keaslian, manajemen akses terdesentralisasi (melalui smart contract), serta transparansi. Dapat disampaikan bahwa sejauh ini aspek tersebut tidak memiliki kendala berarti dalam proses bisnis dan TIK DJBC.
  - Saat ini Direktorat IKC DJBC sedang dalam tahap mengkaji pemanfaatan blockchain dalam sistem kepabeanan, dan penyiapan SDM TIK yang kompeten dalam implementasi teknologi tersebut.
- **Kesimpulan:**
  - adopsi ValidAP belum menjadi kebutuhan segera/mendesak, karena *added value* dalam ValidAP sdh cukup terakomodir dalam sistem existing di DJBC dan sudah cukup megakomodir beberapa proses bisnis kepabeanan yang saat menjadi kebutuhan terkini DJBC dalam;
  - namun demikian, DJBC tdk menutup kemungkinan utk bergabung, hanya saja perlu adanya persiapan matang (salah satunya dg mengkaji pemanfaatan blockchain dan penyiapan SDM)

Other business

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

1. Pada pertemuan RHCA ke-26, DJBC telah mengusulkan untuk membahas dan menyusun skema nominasi/ appointment Vice Chair melalui rotasi berdasar sub-region, dalam hal terjadi kekosongan nominasi. Apabila nominasi sudah tersedia, DJBC dapat mendukung nominasi Vice-chair dimaksud.
2. ValidAP
   DJBC dapat menyampaikan beberapa poin intervesi sebagai berikut:
   - mengapresiasi APVC atas inisiasi ValidAP;
   - menyampaikan pada prinsipnya DJBC menyambut baik terhadap segala inisiatif dalam bidang TIK serta penggunaan teknologi terkini dalam upaya mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan barang lintas negara.;
   - menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki kemungkinan bergabung dalam inisiatif ValidAP, namun masih memerlukan waktu untuk mengkaji kesesuaian dengan infrastruktur yang ada serta mempersiapkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
   - menyampaikan catatan bahwa keberhasilan platform ini sangat bergantung pada komitmen luas dari anggota.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

ValidAP

Thank you, Chair.

Indonesia appreciates the APVC for introducing the ValidAP initiative. We view this as a timely and forward-looking effort to address inefficiencies in document validation through blockchain technology.

Indonesia welcomes initiatives that leverage Information and Communication Technology (ICT) and emerging technologies to enhance the efficiency, transparency, and integrity of cross-border trade processes.

In this context, we see strong potential in ValidAP and are interested in exploring possible participation. We also recognize that its success will rely on broad and sustained commitment from member administrations.

At the same time, we believe that careful preparation is essential for meaningful adoption. Indonesia is currently assessing the potential integration of blockchain technology within our customs ecosystem. This includes evaluating compatibility with existing systems and ensuring the necessary human and technical capacities are in place.

Thank you.

AGENDA ITEM 4: TECHNICAL MATTERS

Pada Agenda item ini akan dibacakan hasil dari *committee*, *sub-committee* dan *working bodies* WCO lainnya selama tahun Anggaran (*Financial year*) berjalan yang memerlukan persetujuan *Council*.

<Chairperson of the Council to lead>

Keterangan:

1. Capacity Building

Akan disampaikan laporan tertulis yang menyoroti hasil-hasil utama yang dicapai oleh Integrity Sub-Committee dan Capacity Building Committee. Council diundang untuk memberikan persetujuan terhadap rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, serta mencermati berbagai capaian yang dilaporkan.

Docs:
SC_Chairperson_Report_Capacity_Building_145.pdf
HC0197Ea
HC0197EAE1a
HC0197EAE2a
HC0197EAE3a
HI0143Ea
HI0143EAE1a
HI0143EAE2a
HI0143EAE3a

2. Tariff and Trade Affairs

Akan disampaikan laporan tertulis yang menyoroti hasil-hasil utama yang dicapai oleh Technical Committee on Rules of Origin, Technical Committee on Customs Valuation, dan Harmonized System Committee. Council diundang untuk memberikan persetujuan terhadap rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, serta mencermati berbagai capaian yang dilaporkan.

Docs:

a. Rules of Origin

SC_Chairperson_Report_Origin_145.pdf
OC0278Ec

b. Valuation

sc_chairperson_report_valuation_145_e
VT1449Ec
HISTORIC_vt1481

c. Nomenclature and Classification

SC_Chairperson_Report_HS_145.pdf
NC3285Eb
NC3285EAB1b
NC3358Eb
NC3358EAB1b
NC3358EAB2b

3. Compliance and Facilitation

Akan disampaikan laporan tertulis yang menyoroti hasil-hasil utama yang dicapai oleh Enforcement Committee dan Permanent Technical Committee. Council diundang untuk memberikan persetujuan terhadap rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, serta mencermati berbagai capaian yang dilaporkan.

Docs:

a. Compliance/Enforcement

SC_Chairperson_Report_Compliance_145.pdf

EC0881Ea
EC0881EAE1a

b. Facilitation/Procedures
SC_Chairperson_Report_Facilitation_145.pdf
PC0769Ea
PC0769EAE1a
PC0769EAE2a
PC0788Ea
PC0788EAE1a
PC0788EAE2a
PC0788EAE3a
PC0788EAE4a
PC0788EAE5a

***The Council* diundang untuk:**
Menyetujui laporan sesi ke-16 Capacity Building Committee (CBC), sesi ke-24 Integrity Sub-Committee (ISC), Sesi ke-43 Technical Committee on Rules of Origin, sesi ke-58 dan 59 Technical Committee Customs Valuation (TCCV), sesi ke-74 dan ke-75, sesi ke-45 Enforcement Committee, seske-245/246 Permanent Technical Committee

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

Indonesia *take note* atas penyampaian laporan pada agenda ini.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):
Take note

PANEL I - Mind the Gap!
How can Customs work with tax authorities to value goods affected by transfer pricing

Keterangan:

1. **Tujuan** : meningkatkan kesadaran administrasi anggota tentang pekerjaan Komite Teknis Nilai Pabean (TCCV) tentang harga transfer, menyoroti kolaborasi sebelumnya dengan OECD, dan mengukur minat dalam mengeksplorasi mengenai isu ini ke depannya
2. **Latar Belakang :**
   - Transaksi antara anak perusahaan dari perusahaan multinasional (MNE) sering tidak mencerminkan dinamika pasar yang terjadi antara pihak yang tidak terkait. Harga yang ditetapkan (*transfer pricing*) bisa dimanipulasi atau secara tidak sengaja menyimpang dari norma yang dapat diterima, menimbulkan kekhawatiran bagi administrasi Bea Cukai dan pajak
   - Dalam konteks penilaian nilai pabean, transaksi semacam ini dianggap sebagai "transaksi pihak terkait" berdasarkan Perjanjian Penilaian Kepabeanan (CVA) dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bea Cukai menentukan apakah harga impor yang dideklarasikan telah dipengaruhi oleh hubungan antar pihak terkait. Jika demikian, Bea Cukai akan menolak harga tersebut dan menetapkan nilai pabean menggunakan metode alternatif sesuai CVA.
   - Dalam konteks pajak, "arm's length principle" dari OECD memandu penetapan dan evaluasi harga transfer. Prinsip ini bertujuan menyelaraskan harga transfer dengan kondisi yang akan terjadi di antara entitas independen.

- Metode yang berbeda yang digunakan oleh Bea Cukai dan otoritas pajak dalam menangani harga transfer telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan importir terkait meningkatnya beban kepatuhan dan risiko pajak berganda. Di sisi lain, pemerintah juga khawatir akan terjadinya "double non-taxation", di mana bisnis memanfaatkan perbedaan ini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.
- Dokumentasi transfer pricing adalah serangkaian catatan yang harus dipelihara oleh perusahaan multinasional untuk membenarkan harga transaksi antara entitas terkait untuk tujuan perpajakan, termasuk studi transfer pricing (TPS) yang menganalisis nilai pasar barang untuk menetapkan harga antar perusahaan sesuai aturan yang berlaku.
- Bagian dari upaya yang dilakukan adalah melihat bagaimana Bea Cukai bisa memanfaatkan dokumentasi transfer pricing yang disusun untuk perpajakan dalam memverifikasi atau menetapkan nilai pabean di bawah CVA.
- Meski Bea Cukai dan pajak menggunakan metode berbeda dan memiliki fokus utama yang berbeda—Bea Cukai lebih khawatir dengan undervaluasi, sedangkan pajak dengan overvaluasi—keduanya memiliki tujuan yang sama: memastikan nilai yang dinyatakan mencerminkan nilai barang sebagaimana adanya jika tidak dipengaruhi hubungan antar pihak terkait

3. Pertanyaan Panduan untuk diskusi
   - Mengingat pengaturan harga transfer bisa sangat kompleks dan mencakup barang dengan nilai pabean yang signifikan, bagaimana administrasi Bea Cukai dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menilai transaksi harga transfer?
   - Bagaimana pendalaman kerja sama antara administrasi Bea Cukai dan pajak dapat menguntungkan kedua organisasi?
   - Mengingat pentingnya bidang kerja ini, apa yang dibutuhkan dari sisi pengembangan kebijakan?

Moderator
Ms. Gael Grooby, Acting Director of Tariff and Trade Affairs, WCO Secretariat

Panellists
Member administration (tbc)
Ms. Gabriela Capristano Cardoso, OECD
Mr. Arnaud Fendler, International Chamber of Commerce (ICC)

Panel Discussion akan
1. Memberikan gambaran tentang pekerjaan yang telah dilakukan pada instrumen TCCV dan pedoman WCO yang menunjukkan bagaimana Bea Cukai dapat mengatasi isu harga transfer dengan menggunakan studi transfer pricing (TPS) yang disiapkan oleh perusahaan multinasional untuk tujuan perpajakan.
2. Mengkaji bagaimana memperkuat kerja sama antara otoritas Bea Cukai dan pajak dengan membangun saluran komunikasi bilateral untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, keahlian, dan data.

Docs:
Concept Note for Transfer Pricing Panel

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):
1. Administrasi kepabeanan dapat meningkatkan kapasitasnya melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip arm's length sebagaimana diatur dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines*, serta metode-metode yang digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar. Dokumen *transfer pricing* yang disusun oleh perusahaan untuk keperluan perpajakan dapat

dimanfaatkan oleh administrasi kepabeanan sebagai informasi pendukung dalam mengevaluasi apakah hubungan antara pihak terkait memengaruhi harga transaksi impor.
Selain itu, penguatan fungsi audit berbasis risiko, sebagaimana dianjurkan dalam praktik kepabeanan internasional, juga menjadi pendekatan efektif. Dokumen *transfer pricing*, dapat digunakan oleh administrasi kepabeanan untuk menilai "*circumstances surrounding the sale*" sebagaimana diatur dalam A*rticle 1.2 (a) WTO Customs Valuation Agreement*. Prinsip ini juga telah dikukuhkan oleh WCO melalui *Technical Committee on Customs Valuation* (TCCV) instruments dalam *Commentary 23.1*, yang menyarankan agar penggunaan dokumentasi *transfer pricing* dipertimbangkan secara *case-by-case*.

2. Pendalaman kerja sama antara administrasi kepabeanan dan otoritas pajak dengan cara pertukaran data, pembentukan kelompok kerja bersama, dan pengembangan kebijakan harmonisasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang sama, pemanfaatan informasi yang sama serta meminimalkan inkonsistensi penilaian dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kolaborasi ini juga mendukung prinsip *trade facilitation* dengan menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan prediktabel.
3. Diperlukan pengembangan kebijakan untuk memastikan bahwa aspek *transfer pricing* dapat diakomodasi secara tepat dalam konteks nilai pabean. Administrasi kepabeanan perlu:
   - Mengadopsi prinsip-prinsip pada *TCCV's instruments* dalam *Commentary 23.1*, termasuk memperbolehkan penggunaan dokumentasi *transfer pricing* sebagai salah satu dasar dalam menilai keadaan seputar penjualan (*circumstances surrounding the sale*);
   - Membangun nota kesepahaman dengan otoritas pajak mengenai pertukaran informasi, pelatihan dan kebijakan bersama atas transaksi pihak terkait;
   - Aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti TCCV pada WCO untuk mengikuti perkembangan terkini dan *best practices*;
   - Memberikan edukasi dan dialog rutin dengan pelaku usaha terkait praktik *transfer pricing* yang baik dan implikasinya terhadap kewajiban kepabeanan.

   Kebijakan ini akan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan akurasi dalam penentuan nilai pabean, serta mendukung upaya negara dalam menciptakan iklim perdagangan yang adil, transparan, dan terfasilitasi.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

AGENDA ITEM 5: Policy Matters
Agenda ini terbagi menjadi pembahasan "A Item" dan "B" item

Docs:

SP0878Eb
SP0897

<Chairperson of the Council to lead>

"A" Items (Isu-isu untuk informasi, laporan progres untuk dicatat, atau isu-isu yang disepakati oleh Working Group dan Committees untuk disahkan*)*

Keterangan:

1. SAFE Framework of Standards - Progress Report

a. SAFE Framework of Standard

Terdapat 10 proposal yang difinalisasikan dari review cycle of SAFE FoS 2021-2025 untuk disesuaikan dengan draft dokumen SAFE FoS 2025 Edition, diantaranya: meningkatkan kerja sama dengan environmental authorities, sealing dan smart security devices, penyediaan pre-arrival data yang lebih akurat dan tepat waktu untuk meningkatkan peniliaian risiko dan fasilitasi, dan meningkatkan kesadaran AEO dan Customs terhadap konspirator internal dan trusted insider.

PC telah menyampaikan dukungan untuk pengesahan SAFE FoS versi terbaru tersebut.

b. Draft UFF 3.0.0 Technical Specification

Sekretariat WCO dan TEG-NII Expert telah mengembangkan spesifikasi teknis UFF 3.0.0 berdasarkan masukan dari members. SAFE WG ke-30 tahun 2024, PTC Okt 2024 dan Mei 2025 serta Policy Commission Dec 2024 telah mengendorsed dokumen tersebut namun sifatnya masih interim/provisional. Setelah disahkan di Council, UFF 3.0.0 sudah harus diimplementasikan.

c. Updated WCO Guidelines for the Procurement and Deployment of Scanning/NII Equipment (NII Guideline)

Berdasarkan 11 proposal masukan dari members, Sekretariat WCO dan NII Expert memperbarui WCO Guidelines for the Procurement and Deployment of Scanning/NII Equipment (NII Guideline) untuk membantu member dalam menentukan pemilihan NII Equipements serta cara mengoprasikannya. Beberapa hightlight tambahan panduan diguidelines adalah: panduang sharing X-Ray images sesama negara anggota, serta aspek keamanan, cybersecurity, dan integrasi data dari peralatan NII.

PC telah menyampaikan dukungan untuk pembaruan WCO NII Guidelines tersebut.

2. WCO Fragile Borders Action Plan - Progress Report

WCO Fragile Borders Action Plan merupakan rencana aksi yang menjadi panduan bagi administrasi pabean dalam menghadapi situasi rentan dan terdampak konflik di perbatasan darat. (sebagai contoh: konflik bersenjata oleh non-state actor) Dokumen ini secara resmi diadopsi dalam Policy Commission ke-88 dan Council Session ke-141/142 pada tahun 2023 dan akan dikembangkan dan diperbarui secara berkala.

Capaian Utama Rencana Aksi

- Kemajuan pemanfaatan Geospatial Intelligence (GEOINT) meliputi integrasi data intelijen, analisis spasial, penempatan sumber daya, pengawasan jarak jauh dan evaluasi operasi perbatasan darat. Pelatihan GEOINT akan dilanjutkan oleh proyek bersama WCO/JICA.
- Pemanfaatan Open-Source Intelligence (OSINT) berupa pelatihan percontohan khusus pertama serta publikasi.
- Setelah evaluasi, dalam Enforcement Committee ke-45, para anggota sepakat untuk menghentikan penggunaan platform IRIS mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan pendanaan.
- Pengembangan Proyek Sirius oleh WCO Security Programme ditujukan untuk meningkatkan kesadaran petugas kepabeanan tentang ancaman penyelundupan senjata di wilayah perbatasan rentan di Eropa

Pembaruan Rencana Aksi

- Berdasarkan diskusi sesi Desember 2024 (Policy Commission ke-91), ditambahkan dua poin aksi baru:
  1. Penyusunan pedoman untuk otoritas pabean tentang peran Bea Cukai di wilayah konflik, serta kompilasi praktik terbaik.
  2. Penelitian lanjutan tentang dampak konflik bersenjata terhadap bea cukai dan perdagangan.

Tantangan Pendanaan

- Mempertimbangkan adanya keterbatasan sumber daya dan pendanaan terdapat rencana aksi yang disepakati untuk dihapus diantaranya sebagai berikut:
  1. Penelitian mengenai negara rentan dan terdampak konflik melalui misi lapangan, termasuk publikasi tahunan.
  2. Pengembangan Platform IRIS.

3. WCO Secretariat Gender Equality and Diversity Work Plan – Progress Report

a. Sekretariat GED WCO telah membentuk beberapa rekomendasi rencana kerja berdasarkan hasil assessment menggunakan GEOAT pada tahun 2021 yang mencakup lima rencana utama sejalan dengan prinsip dalam GEOAT. Dari 28 kegiatan, 10 kegiatan atau setara dengan 56% telah diselesaikan.
b. Virtual Working Group (VWG) GED sampai saat ini telah mencapai 75 member, pertemuan VWG GED selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025.
c. Pertemuan rutin Network for GED akan dilaksanakan pada awal Oktober 2025.
d. WCO telah melakukan pengembangan pool of recognized GED experts melalui program train-the-trainer workshop yang dilaksanakan pada Maret 2023 dan April 2024 dan 7 peserta telah dinyatakan sebagai fully recognized expert.
e. WCO telah meluncurkan WCO Compendium on GED III pada pertemuan Capacity Building Committee pada bulan Februari 2025.

4. Report of the Integrity Sub-Committee – A refreshed mandate

Pertemuan Integrity Sub Committee yang ke 24 telah dilaksanakan pada tanggal 3-4 Maret 2025. Overview ISC ke-24:

a. Beberapa anggota membagikan dampak luas atas penerapan program WCO Anti-Corruption and Integrity Promotion (A-CIP)
b. Sesi dialog membahas mengenai penerapan sistem penghargaan dan sanksi untuk melawan korupsi.
c. Panel diskusi Data Governance to Mitigate Corruption Risks in Automation mengenai bagaimana manajemen data yang kuat dan teknologi canggih dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi
d. ISC juga mempresentasikan mengenai strategi integrity dalam program modernisasi WCO yang mencakup pengembangan WCO Integrity Action Plan, menyediakan forum diantara anggota, private sector dan organisasi internasional untuk pembahasan topik integrity, menyediakan training, conventions dan instrument.
e. Mulai 1 Juli 2025, mandat baru ISC dalam kerangka reformasi dan modernisasi WCO akan ditempatkan di bawah supervisi Deputy Secretary General, menandakan bahwa isu integritas diprioritaskan sebagai isu strategis yang lintas sektor dan memperkuat kapasitas Sekretariat untuk mengelola dan mengintegrasikan topik ini secara menyeluruh di seluruh organisasi.Mandat tersebut terdiri dari:
   - Menjadi focal point dalam WCO Integrity Action Plan dan integrity-related tools
   - Memberikan advise kepada Council dan prioritas integritas WCO
   - Menjadi forum berbagi best practices antara negara anggota
   - Mendorong kerja sama integritas dengan private sector dan international organizations
   - Mengintergrasikan prinsip integritas dalam semua program dan instrumen WCO

The Council* diundang untuk*:

- Take note atas Progress Report

Docs:
SP0878Eb
SP0897

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):
Take note

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):
Take note

***"B" Items (Issues requiring discussion, orientation or guidance*)**

1. e-Commerce

Keterangan:

Dalam Policy Commission, agenda e-commerce melaporkan hasil dari perkembangan intersesi di area e-commerce dan hasil dari pertemuan PTC ke 247/248:

1. Pendekatan baru dalam pembahasan e-Commerce di PTC: diadakan dedicated days (1-2 hari) selama ±4 jam 30 menit sebagai sesi khusus e-commerce di PTC dengan format hybrid.
2. Update *E-commerce Package*: sebagai update dari second periodic review, WCO telah menerima 29 proposal sejak Juli 2024. Namun berdasarkan hasil intersesi, hanya 9 proposal yang akan ditindaklanjuti. Selanjutnya usulan tersebut akan dikelompokkan guna mempermudah proses peninjauan.
3. Compendium of Case Studies e-Commerce: PTC 247/248 mengendorsed Compendium of Case Studies on E-Commerce edisi ke-6.
4. Implementation of the E-Commerce and collaboration with e-commerce stakeholders: Sekretariat WCO terus menjalin kerja sama dengan platform e-commerce dan express courier dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh WCO.
5. Collaboration with the Universal Postal Union (UPU): Pada pertemuan 44th WCO UPU Contact Committee, members mengendorsed WCO-UPU Guidelines on Electronic Advance Data (EAD) and Data Quality dengan tujuan untuk membantu member dan postal operators dalam mengembangkan pengaturan baru dan menyesuaikan pengaturan existing, guna memahami persyaratan EAD dan security yang saat ini berlaku.

Docs:
spo882e Agenda Item VIII (dok PC)
Annex E-commerce (dok PC)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):
TBD

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):
TBD

2. Strategic discussion on the Private Sector Consultative Group

Keterangan

1. WCO telah menyusun Draf Code of Ethics and Conduct bagi PSCG yang mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai WCO dan masukan sektor swasta, sebagai komitmen bersama untuk kolaborasi yang etis dan efektif.
2. Dokumen ini menegaskan prinsip utama yang harus dijunjung anggota PSCG: integritas, profesionalisme, keadilan, dan rasa hormat.
3. Terdapat ketentuan khusus mengenai: penanganan informasi sensitif; pencegahan konflik kepentingan; larangan favoritisme dan penyalahgunaan informasi; netralitas politik, perilaku keuangan yang tepat, dan standar hospitality
4. Berdasarkan Terms of Reference (ToR) PSCG diwajibkan menyampaikan laporan kepada Policy Commission dan Sekretaris Jenderal tentang kegiatan dan pertemuan yang dilakukan. Selain melaporkan kegiatan yang telah dilakukan, PSCG mengajukan usulan untuk meningkatkan kerja sama dengan WCO sebagai berikut:
   a. PSCG berharap dapat berpartisipasi dalam sesi formal Policy Commission untuk mempresentasikan laporan tahunan dan diikuti dengan sesi Q & A
   b. Memperkuat sesi dialog tahunan antara PSCG dan Policy Commission dengan penyusunan agenda bersama, dan alokasi sesi khusus selama tiga jam dalam pertemuan PC bulan Juni, serta proses terstruktur untuk menindaklanjuti hasil-hasil yang telah disepakati.

Docs:

SP0886e Agenda Item IX (dok PC)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

1. Mendukung pengesahan Code of Ethics and Conduct
2. Mendukung pengaturan existing yaitu melalui sesi dialog tahunan sebagai platform yang memadai dan tepat untuk keterlibatan Policy Commission dengan PSCG
3. Mendorong keterlibatan aktif PSCG dalam diskusi prosedur kepabeanan melalui working bodies WCO, khususnya PTC untuk meningkatkan kontribusi di level teknis
4. Mendukung penyusunan agenda dialog tahunan yang selaras dengan focus area Strategic Plan agar sesuai dengan prioritas organisasi

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Intervensi yang disampaikan dalam Policy Commission sebagai referensi:

Thank you, Chair. Indonesia supports the adoption of the Code of Ethics and Conduct, as it establishes a strong ethical foundation for responsible and effective public-private collaboration.

With regard to the proposal from the PSCG, we note that the current practice of holding a separate, dedicated session for dialogue with the private sector has been both effective and constructive. We value the opportunity for open exchange in this format, which allows for focused and meaningful engagement. Furthermore, we recognize the important contributions of the private sector, particularly within technical-level discussions, where their input continues to support the development of practical and implementable customs solutions. In this regard, we believe that maintaining the current arrangement between the Policy Commission's formal sessions and private sector participation remains appropriate and effective for preserving the integrity of Member-driven deliberations.

Lastly, we support aligning the agenda of the annual dialogue with the focus areas of the Strategic Plan to ensure consistency with the Organization's priorities.

3. Project Proposal – Enhancing the Harmonized System (HS) framework

Keterangan:

1. Project proposal "Enhancing the Harmonized System (HS) Framework" adalah dokumen Business Case yang diajukan Sekretariat WCO untuk menerjemahkan 15 rekomendasi hasil Studi Eksplorasi Strategic Review HS menjadi langkah-langkah konkret yang bisa langsung diterapkan.
2. Proyek ini berada di bawah Rencana Strategis WCO "SP1: mengembangkan, memelihara, dan menerapkan instrumen"' dan bertujuan menyiapkan usulan konkret bagi HSC untuk meningkatkan alat, proses, dan kemudahan menggunakan HS, termasuk kemungkinan amandemen HS 2033.
3. Proyek ini telah disetujui Policy Commission 91 dan Finance Committee 74 dengan menggunakan pendanaan Cadangan WCO (WCO Reserves) sebesar €500.000 (± €480.000 gaji untuk min. 2 project officers dwibahasa, €20.000 kontinjensi).
4. Proyek ini berdurasi 30 bulan, dijadwalkan mulai akhir 2025 atau Januari 2026. Publikasi dokumen kerja dilakukan pada awal Februari 2028.
5. Berdasarkan 15 rekomendasi, kerja dibagi empat alur: (1) drafting & format; (2) revisi aturan & catatan penjelas; (3) pembaruan proses internal; (4) dokumen kebijakan untuk isu tertentu.
6. Output utama:
    a. Usulan alat/prosedur bagi HSC, RSC, dan Sekretariat dalam siklus peninjauan HS.
    b. Draft amandemen HS/perangkatnya untuk HS 2033 guna meningkatkan kejelasan dan kemudahan penggunaan.
    c. Usulan prosedur internal WCO guna meningkatkan efisiensi pekerjaan HS yang dilakukan oleh Sekretariat.
    d. Dokumen diskusi kebijakan atas rekomendasi yang memerlukan keputusan kebijakan, untuk dipertimbangkan oleh HSC.
    e. Penyerahan laporan akhir hasil proyek kepada HSC, Policy Commission, dan Council.
7. Output sekunder: Penyerahan laporan interim kepada HSC, Policy Commission, dan Council mengenai perkembangan proyek.
8. Manfaat yang diharapkan: efisiensi drafting, dukungan anggota lebih baik (seperti tabel korelasi), kejelasan HS yang lebih tinggi; dan peningkatan kemudahan penggunaan HS dan Explanatory Notes.
9. Pertanyaan untuk Diskusi: Apakah Business Case ini layak dilaksanakan? Apakah Para Anggota siap menyetujui dimulainya project ini?
10. Policy Commission diminta untuk:

- mencatat hasil pertimbangan Finance Committee atas proposal proyek terkait "Enhancing the Harmonized System (HS) Framework"
- mempertimbangkan dan, jika sesuai, mengesahkan proposal proyek dalam Business Case
- memberikan panduan kebijakan tambahan, jika diperlukan

Docs:
spo887e (dok PC)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

1. Mendukung pengembangan HS agar tetap relevan dan efektif, termasuk melalui inisiatif yang sedang berjalan. Pengembangan dan investasi dalam kemajuan HS harus diprioritaskan karena perannya yang krusial dalam mempermudah perdagangan internasional dan mengurangi ketidakseragaman dalam klasifikasi barang.
2. Mendukung WCO untuk memulai project sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
3. Pendanaan dari Cadangan WCO layak jika dialokasikan sesuai prioritas strategis, dengan transparansi, akuntabilitas, dan tetap menjaga stabilitas keuangan.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Thank you, Chair.

Indonesia reiterates our position conveyed at the Policy Commission, reaffirming strong support for the continued development and simplification of the Harmonized System (HS). We stress the importance of ensuring project outcomes are reported periodically to the HSC, remain focused on general guidance rather than detailed product-specific amendments, and are completed on or ahead of schedule to align with the development of HS 2033.

We also emphasize the need to consider the implementation capacities of developing countries, conduct thorough impact assessments, and ensure sufficient training before introducing any major changes. Any revision to the GIRs should preserve the core principles of the HS to avoid disruptions to national systems. We support efforts to modernize the correlation table drafting process through improved digital access and intersessional engagement. Regarding financing, we find the use of the WCO Reserve Fund appropriate, provided it is aligned with strategic priorities and maintains transparency.

4. Declaration of the Customs Co-operation Council on Green Customs (the Baku Declaration) - Proposal from Azerbaijan

Keterangan:

- *Council* akan mendengarkan hasil kesimpulan dan rekomendasi *Policy Commission* terkait pembahasan *Declaration of the Customs Co-operation Council on Green Customs* (Baku Declaration), yang diusulkan oleh Republik Azerbaijan;
- Pembahasan Deklarasi pada pertemuan Policy Commission tersebut dengan memperhatikan kesimpulan yang telah dicapai dalam Sidang PTC ke-247/248 yang menyetujui beberapa penyesuaian: tiga perubahan redaksional kecil tanpa ubah substansi; penyesuaian referensi pada "HS" dan penghapusan istilah "standards and policies".

Relevansi dan Keterlibatan DJBC

- Baku Declaration merupakan outcome diskusi side event "*Green Customs*" pada forum strategis COP29 UNFCCC di Azerbaijan, Nov 2024. DJBC menjadi pembicara pada forum tersebut, menyampaikan paparan "*Customs Facilities as Catalysts towards a Circular Economy*".
- Pada prinsipnya delarasi bersifat *non-binding*, dan klausul dalam deklarasi bersifat komitmen dukungan umum (*general commitments of support*) yang mendorong kerja sama dan penguatan penegakan hukum lingkungan, perdagangan hijau, dan pemanfaatan teknologi dalam kepabeanan.

Docs:
SP0858E Policy Matters
Draft *Baku Declaration* *https://drive.google.com/BakuDEclarationText*

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

- DJBC pada pertemuan Council Sessions dapat menyampaikan apresiasi dan dukungan atas *Declaration of the Customs Co-operation Council on Green Customs* (*Baku Declaration*)

Catatan:

- DJBC telah terlibat dalam proses penyempurnaan draft text bersama Azerbajan Customs, dan telah menyampaikan dukungan dan memberikan beberapa catatan masukan, Dimana terdapat satu masukan tekstual yang belum terakomodir;
- Pada pertemuan *Policy Commission*, DJBC memberikan intervensi atas masukan yang belum terakomodir tersebut, yang pada intinya menyampaikan pentingnya penyeimbangan penyebutan aspek *facilitation* dan *enforcement*, karena aspek *enforcement* belum konsisten disebutkan dalam draft deklarasi.

Teks asli:

"Recognizing the pivotal role of Customs administrations ***in facilitating trade that supports environmental sustainability,*** *enhances climate resilience and contributes to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)"*

Usulan penyesuaian:

"Recognizing the pivotal role of customs administrations ***in the prevention and countering of illegal activities and facilitating legal trade*** *that supports environmental sustainability, enhances climate resilience, and contributes to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)".*

Alternative:

"Recognizing the pivotal role of customs administrations ***in both preventing and countering/combating illegal activities, while also*** *facilitating legal trade that supports environmental sustainability, enhances climate resilience, and contributes to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)".*

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Thank you, Chair.

Indonesia would like to reiterate its appreciation to the Republic of Azerbaijan for initiating the Baku Declaration on Green Customs, and to commend the WCO for its facilitation throughout the process.

We again, convey our full support for this Declaration as a commitment to strengthening Customs cooperation on environmental protection, green trade, and sustainable technologies. We also recall our contribution during the Green Customs side-event at COP29 in Baku last year, which laid the groundwork for this Declaration.

In reviewing the Declaration, Indonesia underscores the importance of reflecting the full scope of Customs' mandate—both in facilitating legal trade but also in preventing and combating illicit activities. In this regard, we respectfully suggest a refinement to the preambular paragraph to ensure it fully and consistently captures the dual role of Customs administrations—both in facilitating legal trade and in preventing and combating illicit activities—as essential to advancing environmental sustainability, climate resilience, and the achievement of the Sustainable Development Goals.

Thank you, Chair.

5. Future of the Data and Statistics Working

Keterangan:

1. WGDS dibentuk pada Juni 2022 di bawah WCO Data Strategy dan telah menyelesaikan mandatnya selama 3 (tiga) tahun dengan pertemuan 2 (dua) kali setahun. Pertemuan terakhir (ke-6) pada bulan Mei 2025.
2. Perlu ditentukan Badan WCO mana yang paling tepat (Permanent Technical Committee (PTC) atau Capacity Building Committee (CBC)) untuk mengambil alih tugas WGDS serta mekanisme formal yang diperlukan.
3. Perlu dibahas urgensi keberlanjutan 3 (tiga) compendium yang dikembangkan WGDS sebagai dasar yang dapat digunakan pada PTC / komite terkait lainnya yaitu:
   a. Compendium on Best Practices for Common Data Definitions and Data Standards for Aggregated Customs Statistics
   b. Compendium on Members' Experiences in Data Sharing and Data Exchange
   c. Compendium on National Data Strategies
4. Perlu ditentukan tata cara WCO untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan dari anggota dan pemangku kepentingan, serta koordinasi atas inisiatif terkait data secara efektif agar tidak terjadi duplikasi.

Docs:

SSP0889Ea (dok PC)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

1. Mendukung penuh pengesahan hasil kerja WGDS sebagai fondasi penguatan tata kelola data dan statistik untuk kepabeanan secara global.
2. Menekankan pentingnya keberlanjutan 3 (tiga) compendium WGDS sebagai dokumen yang terus diperbarui dan diperkaya.
3. Mendorong pembentukan mekanisme koordinasi lintas badan WCO guna menyinergikan inisiatif terkait data dan mencegah tumpang tindih.
4. Mendukung pekerjaan WGDS ke PTC dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing working bodies di WCO.
5. Siap berkontribusi aktif dalam forum data WCO dan berbagi praktik baik Indonesia terkait pengelolaan data dan statistik kepabeanan.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Thank you, Chair.

Indonesia wishes to express its appreciation for the valuable work of the Working Group on Data and Statistics (WGDS) and fully supports the endorsement of its outputs. We believe that the work delivered by the Group provides a solid foundation for strengthening the governance of Customs data and statistics at the global level.

We would like to highlight the importance of ensuring the sustainability of the three Compendiums developed by the WGDS. These documents represent a collective effort and should be maintained as living references—regularly updated and further enriched with contributions from Members.

*Looking ahead,**Indonesia is of the view that the Permanent Technical Committee (PTC) could be well positioned to carry forward the mandate of the WGDS, subject to a clear and appropriate articulation of its scope and reporting lines, while also ensuring that the workload of each relevant Directorate within the WCO is taken into account. We also see merit in exploring the establishment of a structured coordination mechanism across relevant WCO bodies to enhance synergy, ensure coherence, and prevent duplication in data-related initiatives.***

Indonesia reaffirms its commitment to actively engage in future WCO data-related activities and stands ready to share its national experiences and good practices in the management of Customs data and statistics.

Thank you, Chair.

PANEL II: Data-driven appoaches to e-commerce in Customs
< Chairperson of the Council to lead >

1. Latar Belakang:
   a. Pertumbuhan perdagangan global kini semakin digerakkan oleh teknologi dan data; e-commerce merupakan ilustrasi utama perkembangan tersebut. Lonjakan volume transaksi e-commerce menjadikan kebutuhan akan data yang andal, terstandar, dan pertukaran data yang efektif semakin kritis. Sasaran strategisnya adalah menyeimbangkan kepatuhan dan fasilitasi perdagangan yang sah, dengan informasi sebagai pengungkit utama.
   b. Selaras dengan WCO Strategic Plan 2025-2028 yang menempatkan bukti dan data sebagai pusat kerja Customs, panel ini akan mengeksplorasi bagaimana Customs memanfaatkan teknologi dan inovasi—dua pilar strategis WCO—untuk menjawab tantangan sekaligus peluang e-commerce. Concept Note for e-Comm…
   c. Diskusi akan menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi baru guna memperoleh data berkualitas tinggi untuk mengefisienkan proses e-commerce, memperkuat manajemen risiko, serta menjaga privasi dan keamanan data. Delegasi dapat mendiskusikan cara Customs beradaptasi dengan lanskap e-commerce yang cepat berubah dan menangani isu-isu utama terkait data.
2. Pertanyaan Panduan untuk Delegasi
   a. Bagaimana teknologi baru—seperti artificial intelligence, machine learning, dan blockchain—dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu, ketepatan waktu, serta standarisasi data yang digunakan dalam proses e-commerce Customs?
   b. Perlukah dikembangkan himpunan data dan standar guna menjamin pertukaran informasi yang efektif dan interoperabel antara Customs dan pemangku kepentingan e-commerce, dan bagaimana standar internasional seperti WCO Data Model dapat mendukungnya?

c. Mengingat ekosistem e-commerce yang terfragmentasi, model kolaborasi apa antara Customs dan pemangku kepentingan e-commerce (mis. platform, operator pos, kurir ekspres) yang dapat diadopsi untuk memperoleh data yang tepat dari sumber yang tepat pada waktu yang tepat demi analisis risiko yang lebih efektif?
d. Bagaimana administrasi Customs dan pemangku kepentingan e-commerce dapat bekerja sama menjamin privasi dan keamanan data?

Moderator:
Fabiano Coelho, Director General of Brazil Customs
Panelis:

1. Nerea Rodríguez Entremonzaga, Director General of Spain Customs
2. H.E. Rashed Lahej Al Mansoori, Director General of Abu Dhabi Customs, Uni Emirat Arab
3. Carlos Grau Tanner, Director General, Global Express Association (GEA)

Docs:
Concept Note for e-Commerce Panel

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

1. Teknologi baru seperti AI, Machine Learning dan data analytics memainkan peran krusial dalam meningkatkan kapabilitas penegakan hukum Bea Cukai, terutama dalam lanskap *e-commerce* lintas batas yang dinamis. Tren *e-commerce* yang terus berkembang menuntut peningkatan infrastruktur serta kolaborasi yang lebih erat dengan *marketplace*. AI dapat membantu mengidentifikasi barang yang berpotensi mencurigakan melalui pemodelan data prediktif. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana AI memungkinkan pemrofilan dan penargetan yang lebih cepat dan akurat, terutama bila didukung oleh data *real-time*. Dalam arena penegakan hukum, teknologi ini memungkinkan Bea Cukai untuk melakukan profiling yang akurat, mendeteksi anomali, dan menargetkan konsinyasi berisiko tinggi secara efektif. AI dan data analitik juga membantu dalam deteksi dini upaya penyelundupan dan distribusi barang ilegal, sehingga secara signifikan memperkuat kapabilitas penegakan hukum.
2. Pengembangan set data yang terstandarisasi untuk mendukung kerangka manajemen risiko bersama bagi *e-commerce* lintas batas adalah suatu keharusan. Set data yang terstandarisasi sangat esensial untuk manajemen risiko dan penargetan yang efektif. Pembentukan standar data global akan meningkatkan interoperabilitas, akurasi data, dan kualitas analisis risiko. Selain itu, standarisasi sangat penting untuk memastikan bahwa data dari Bea Cukai, *marketplace*, dan penyedia logistik selaras, sehingga meningkatkan akurasi pemrofilan dan penegakan hukum secara keseluruhan. Terakhir, set data yang terstandarisasi bersifat fundamental untuk respons yang proaktif dan tepat waktu, terutama dalam mitigasi transaksi dan ancaman berisiko tinggi dalam lingkungan *e-commerce*.
3. Kemitraan dengan platform e-commerce dipandang sebagai pendorong utama bagi Bea Cukai untuk mengelola dan menganalisis data *e-commerce* dengan lebih baik. Pentingnya kolaborasi antara administrasi Bea Cukai dan *marketplace e-commerce* dalam menyediakan akses ke data transaksi yang terperinci sangat krusial untuk pemrofilan dan penargetan.

   Sebagai informasi, pada tahun 2019, DJBC telah menjalin kemitraan dengan *platform e-commerce* di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.04/2019 (Skema DDP/ *De Minimis*). Di bawah kemitraan ini, *platform e-commerce* secara rutin mengirimkan katalog produk *e-commerce* lintas batas mereka ke DJBC (*e-catalog*) dan faktur elektronik untuk barang yang dikirim ke Indonesia (*e-invoice*) sebagai referensi untuk penentuan otomatis tarif dan bea masuk oleh sistem kami.

Kemitraan dengan platform e-commerce juga dapat memfasilitasi pertukaran data yang aman dan *real-time* serta membantu mengembangkan sistem pemrofilan risiko yang lebih efektif. Kemitraan ini dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu data, yang pada gilirannya mendukung proses analisis risiko yang lebih responsif dan mendukung rantai pasok *e-commerce* yang bergerak cepat.

4. Untuk menumbuhkan kepercayaan dalam berbagi data, semua direktorat menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar perlindungan dan privasi data, sekaligus membangun mekanisme kolaborasi yang transparan dan aman. Beberapa langkah dapat diambil, termasuk pembentukan nota kesepahaman (MoU) untuk penggunaan data dan penerapan akses data terkontrol berdasarkan kebutuhan. Selain itu, diperlukan pertukaran data yang terenkripsi, kepatuhan ketat terhadap regulasi privasi, dan audit berkala untuk memastikan keamanan data. Secara keseluruhan, menjaga privasi dan membangun kepercayaan bersama memerlukan tata kelola data yang robust, sistem informasi yang aman, dan protokol kontrol akses yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan atau akses yang tidak legal

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Indonesia's point view

1. According to Indonesia's view, emerging technologies like artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and data analytics play a crucial role in enhancing Customs enforcement, particularly in the dynamic landscape of cross-border e-commerce. The evolving e-commerce trend demands improved infrastructure and closer collaboration with marketplaces. AI can help in identifying potentially suspicious goods through predictive data modeling. In addition, it's important to understand how AI enables faster and more accurate profiling and targeting, especially when supported by real-time data. In the enforcement arena, these technologies allow Customs to conduct intelligent profiling, detect anomalies, and target high-risk consignments effectively. Also, AI and analytics assist in the early detection of smuggling attempts and the distribution of illegal goods, thereby significantly strengthening enforcement capabilities.
2. Yes, indeed it's a necessity to develop standardized datasets to support a common risk management framework for cross-border e-commerce. Standardized datasets are essential for effective risk management and targeting. Establishing global data standards would improve interoperability, data accuracy, and the quality of risk analysis. In addition, the importance of standardization to ensure that data from Customs, marketplaces, and logistics providers are aligned, thus enhancing the overall accuracy of profiling and enforcement. Lastly, standardized datasets are fundamental for proactive and timely responses, especially in mitigating high-risk transactions and threats in the e-commerce environment.
3. Based on our national experience, Public-private partnerships (PPPs) are seen as key enablers for Customs to better manage and analyze e-commerce data. The importance of collaboration between Customs administrations and e-commerce marketplaces in providing access to detailed transaction data, which is crucial for profiling and targeting.

   For your information, in 2019, DGCE established a partnership with e-commerce platforms in Indonesia through Regulation number PMK 199/2019 (DDP Scheme). Under this partnership, e-commerce platforms regularly submit their cross-border e-commerce product catalogs to DJBC (e-catalog) and electronic invoices for goods shipped to Indonesia (e-invoice) as references for the automatic determination of tariffs and customs duties by our system.

   PPPs can also facilitate secure, real-time data sharing and help develop more effective risk profiling systems. These partnerships can improve the quality and timeliness of data, which in turn supports a more responsive risk analysis process and supports the fast-moving e-commerce supply chain.
4. To foster trust in data sharing, all directorates stressed the importance of adhering to data protection and privacy standards while establishing transparent and secure collaboration mechanisms. Several measures can be taken, including the establishment of memorandums of

understanding (MoUs) for data use, data masking techniques, and implementing controlled access to data based on necessity. It's also required for encrypted data exchanges, strict compliance with privacy regulations, and regular audits to ensure data security. Overall, safeguarding privacy and building mutual trust require strong data governance, secure information systems, and rigorous access control protocols to prevent misuse or unauthorized access.

PANEL III – Delivering impact in Capacity Building: A shared responsibility under the new Paradigm
< Chairperson of the Council to lead >

1. Latar Belakang:
   a. Program capacity building WCO selama ini telah membuktikan kelayakan model organisasi tersebut—mulai dari perumusan perencanaan strategis hingga pelaksanaan program pengembangan terarah—serta mendorong semangat modernisasi di kalangan Customs dan komunitas pembangunan global. Namun, setelah beberapa dekade praktik dan sejalan dengan inisiatif reformasi-modernisasi komprehensif WCO, pendekatan ini perlu dibayangkan ulang agar selaras dengan arah masa depan WCO serta penggunaan sumber daya yang lebih optimal.
   b. Paradigma baru dirancang untuk menjawab permintaan anggota yang meningkat secara cepat melalui pendekatan yang lebih strategis, berbasis bukti, dan efisien sumber daya. Intinya adalah tanggung jawab bersama di antara seluruh pemangku kepentingan—WCO, Member beneficiaries, entitas regional, dan pakar teknis—guna menjamin intervensi capacity building yang relevan, tepat waktu, terukur, dan berdampak. Penekanan khusus diberikan pada pentingnya asesmen kebutuhan yang kuat, keterlibatan inklusif, serta mekanisme umpan balik yang diperkuat, termasuk tantangan penilaian dampak (impact assessment) yang menuntut data serta kolaborasi aktif dari para anggota.
2. Pertanyaan Panduan untuk Delegasi
   a. Bagaimana WCO, administrasi anggota, dan Regional Offices for Capacity Building (ROCBs) dapat berkolaborasi untuk memprioritaskan kebutuhan capacity building secara berbasis bukti?
   b. Metode apa yang paling efektif untuk memantau penerapan praktik yang diperbaiki hasil intervensi capacity building?
   c. Mode penyampaian capacity building mana yang harus diprioritaskan, disempurnakan, atau dikembangkan demi intervensi yang lebih berdampak?
   d. Bagaimana, dan sejauh mana, kita dapat memanfaatkan alat WCO yang ada—termasuk WCO Performance Measurement Mechanism (PMM)—untuk membangun fondasi penilaian dampak intervensi capacity building?
   e. Apa tantangan utama Anda dalam menyediakan umpan balik dan data tentang intervensi capacity building, serta solusi potensial untuk mengatasinya?

Moderator:

Sigfríður Gunnlaugsdóttir, Head of International Affairs, Iceland Revenue and Customs

Panelis:

1. Megan Shaw, Head of International Customs and Border Engagement, HMRC
2. Dr. Velma Ricketts Walker, Executive Commissioner, Jamaica Customs Agency
3. Mupishi K. Miti, Project Manager, Customs Services Division, Zambia Revenue Authority

Docs:

Concept Note for Capacity-Building Paradigm Panel

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

Jawaban atas Pertanyaan Panduan untuk Delegasi

1. DJBC mendukung penyederhanaan pelaporan dan pemanfaatan platform digital WCO yang lebih ramah pengguna untuk survei kebutuhan pengembangan kapasitas.DJBC juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara Sekretariat WCO dan ROCB melalui rencana kerja bersama, koordinasi rutin, dan pembagian peran yang jelas. Capacity Building Needs Survey sebaiknya dilakukan melalui satu pintu, yaitu ROCB, untuk diteruskan ke Sekretariat WCO. Untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, DJBC mengusulkan kolaborasi WCO/ROCB/RTC dengan negara mitra, misalnya kerja sama ROCB Asia Pasifik atau RTC Indonesia dengan Indonesian Aid untuk program di kawasan Pasifik.
2. Berbagai metode dapat digunakan untuk memantau implementasi praktik pasca intervensi capacity building. Selain mengembangkan tools yang ramah pengguna, pendekatan evaluasi seperti Model Kirkpatrick—minimal hingga Level 3 (Behavior)—perlu diprioritaskan untuk memastikan penerapan hasil pelatihan di tempat kerja. Model ini juga direkomendasikan dalam Compendium of Training Management in Asia Pacific dan telah digunakan oleh sejumlah administrasi kepabeanan di kawasan.
3. Semua metode penyampaian capacity building dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan dampaknya, dengan menyesuaikan pada kebutuhan, hasil yang diharapkan, dan ketersediaan sumber daya. Akan tetapi, DJBC merekomendasikan agar pendekatan blended learning diprioritaskan karena dapat menjangkau lebih banyak peserta. Selain itu, mekanisme mobilisasi experts WCO perlu diperkuat, termasuk perencanaan kebutuhan experts secara dini agar anggota memiliki waktu cukup menyiapkan kandidat terbaik.
4. WCO tools, misalnya Performance Measurement Mechanism (PMM), dapat ditingkatkan untuk menilai dampak perbaikan program capacity-building dengan mengaitkan hasil pengukuran secara langsung dengan tujuan dan output dari kegiatan capacity-building. Pendekatan ini akan memperkuat relevansi hasil PMM sebagai dasar evaluasi dampak dari dilakukannya perbaikan program capacity-building.
5. Tantangan utama dalam penyampaian umpan balik dan data terkait intervensi penguatan kapasitas mencakup belum tersedianya panduan teknis serta sistem pelaporan yang terstandardisasi dan mudah digunakan, serta adanya data bersifat rahasia (confidential) yang memerlukan pengaturan perlindungan yang jelas. Untuk mengatasi hal ini, DJBC menyarankan agar WCO membangun sistem pelaporan yang user-friendly dan dilengkapi dengan mekanisme perlindungan keamanan data.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Berdasarkan jawaban atas Pertanyaan Panduan untuk Delegasi

Thank you, Chair

1. *Indonesia supports the simplification of reporting processes and the use of more user-friendly WCO digital platforms for capacity-building needs surveys. We also encourage stronger synergy between the WCO Secretariat and the ROCB through joint work planning, regular coordination, and clear division of responsibilities. The capacity-building needs survey should preferably be conducted through a single channel—namely the ROCB—for further submission to the WCO Secretariat. To address funding constraints, we propose greater collaboration between the WCO, ROCB/RTC, and partner countries. For example, ROCB Asia Pacific or RTC Indonesia could work together with Indonesian Aid to implement capacity-building programmes in the Pacific region, in close coordination with the WCO.*
2. *Indonesia believes that various methods can be employed to monitor the implementation of practices following capacity-building interventions. In this regard, we emphasize the importance of developing user-friendly monitoring tools, as well as prioritizing evidence-based evaluation approaches such as the Kirkpatrick Model, at least up to Level 3 (Behavior), to ensure that training*

outcomes are effectively translated into workplace practices. This model is also recommended in the Compendium of Training Management in Asia Pacific and has been adopted by several Customs administrations in the region.

3. *Indonesia acknowledges that all capacity-building delivery methods can be further developed to enhance their effectiveness. However, Indonesia recommends prioritizing a blended learning approach, combining in-person and online formats to optimize participants' reach. Additionally, the expert mobilization mechanism should be strengthened, including early planning of expert needs to allow sufficient time for Members to prepare qualified candidates.*
4. *Indonesia believes that WCO tools, such as the Performance Measurement Mechanism (PMM), can be further enhanced to better assess the impact of improvements in capacity-building programms. This could be achieved by directly linking measurement outcomes with the specific objectives and outputs of capacity-building activities. Such an approach would reinforce the relevance of the PMM results as a solid basis for evaluating the effectiveness and impact of capacity-building enhancements.*
5. *Indonesia recognizes that effective feedback and data submission are essential to the success and continuous improvement of capacity-building interventions. However, several challenges persist, including the lack of clear technical guidance, non-standardized reporting systems, and limitations in sharing confidential data without appropriate safeguards. To address these issues, Indonesia encourages the WCO to develop a user-friendly digital reporting system, supported by practical technical guidance, and to establish clear data protection policies to ensure the security and confidentiality of Member contributions.*

Thank you, Chair

AGENDA ITEM 6: Governance Matters

Report of the 19th Meeting of the Audit Committee

Chairperson of the Council to lead>

1. Memberi gambaran hasil Pertemuan Audit Committee ke-19 kepada Policy Commission dan Council, yang berisi:
   I. Audit Eksternal terhadap Kekurangan Dana: evaluasi terkait lingkungan pengendalian dalam proses pendanaan Organisasi. Sistem pengendalian pendanaan dinilai baik oleh KPMG, namun ada 6 rekomendasi perbaikan yang diterima Sekretariat.

No.	Temuan	Rekomendasi	Target Implementasi
1	Ketergantungan tinggi pada sedikit donor besar, dan proyek mengikuti fokus para donor.	Diversifikasi basis donor, buat database donor yang memetakan kontribusi dan area minat mereka, serta komunikasikan tujuan strategis organisasi secara efektif kepada para donor.	Juni 2027 (setelah PMO matang)
2	Tidak ada prosedur standar untuk keterlibatan donor dan belum ada Project Management Office (PMO).	Bentuk PMO untuk menstandarkan prosedur, termasuk pedoman bisnis, daftar periksa, pedoman anggaran, dan template lain.	Juni 2026
3	Pelaporan keuangan tepat waktu ke donor terkendala kapasitas terbatas di layanan akuntansi, keterlambatan proyek, dan ketidaksesuaian tenggat waktu.	Tingkatkan kapasitas akuntansi dan selaraskan tenggat waktu pelaporan donor dengan internal.	Desember 2026

4	Tidak ada kebijakan standar untuk iuran tahunan; sanksi keterlambatan baru diterapkan setelah 2 tahun.	Tetapkan kebijakan jelas untuk penyesuaian iuran dan sanksi keterlambatan, serta komunikasikan lebih awal kepada anggota.	Juni 2026
5	Sumber daya terbatas untuk menyusun proposal dan business case, serta terlalu bergantung pada manajer dana.	Alihkan sumber daya ke PMO, susun proposal standar, dan latih staf serta manajemen.	Juni 2026
6	Pelatihan dan e-learning untuk non-anggota WCO belum dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan.	Evaluasi potensi pendapatan, dan jika signifikan, investasikan sumber daya untuk memperluas pelatihan ke luar anggota WCO.	Juni 2027

II. Audit Internal 2024 tentang Fraud & Korupsi (Internal Control Framework): bertujuan untuk memastikan WCO memiliki kerangka yang kuat untuk mencegah penipuan dan korupsi, melalui peninjauan kebijakan yang ada dan perbandingan dengan organisasi internasional sejenis. Ditemukan 7 rekomendasi untuk memperkuat pengendalian, semua diterima. Disarankan audit lanjutan pada 2026.

No.	Rekomendasi	Tujuan
1	Bergabung dengan jaringan profesional seperti Heads of Internal Audit in International Organizations (HOIA), Representatives of Internal Audit Services (RIAS), dan Ethics Network of Multilateral Organizations (ENMO) untuk peningkatan kapasitas dan wawasan strategis.	Meningkatkan wawasan strategis dan kolaborasi
2	Buat dan terapkan kebijakan menyeluruh terkait penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan rekonsiliasi kas.	Menjamin keamanan, pencatatan, dan rekonsiliasi transaksi tunai
3	Terapkan sistem akses brankas dua orang untuk meningkatkan keamanan dan akuntabilitas.	Meningkatkan keamanan fisik dan mencegah manipulasi
4	Kembangkan pelatihan daring tentang pencegahan Anti-Fraud bagi seluruh staf untuk memperkuat integritas organisasi.	Menanamkan budaya transparansi dan kewaspadaan
5	Susun kebijakan khusus anti-fraud & korupsi yang komprehensif untuk memperkuat pengendalian internal dan etika organisasi.	Menjadi pondasi pengendalian internal organisasi
6	Bangun sistem pelacakan aset fisik untuk pemantauan, penggunaan, dan pengelolaan yang efisien dan aman.	Optimalkan pengelolaan dan akuntabilitas aset
7	Tetapkan prosedur formal untuk pengelolaan barang berharga di brankas, termasuk opsi simpan, donasi, lelang, atau pembuangan sesuai aturan.	Menjamin etika, legalitas, dan transparansi pengelolaan aset

III. Pembaharuan Audit Internal 2023 tentang Ketidakmampuan Beradaptasi dengan Perubahan Lingkungan: Komite Audit menyetujui pembaruan audit internal 2023 tentang ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Cakupan audit diperluas dengan benchmarking ke INTERPOL, OECD, dan WTO. Hasilnya, muncul rekomendasi baru: mempertimbangkan integrasi AI dalam proses strategic foresight untuk meningkatkan daya saing dan respons organisasi

terhadap tantangan global. Sekretariat menilai perlu analisis biaya-manfaat sebelum memutuskan rekomendasi tersebut.

IV. Rencana Strategis WCO:
   a. Renstra 2024/2025: 31% target selesai, 61% berjalan (rata-rata penyelesaian 60%), 4 belum dimulai (terkendala dana). Tidak ada isu berisiko tinggi yang diidentifikasi, progres dinilai selaras dengan siklus kerja tahunan. Empat deliverables yang belum dimulai:
      (1) Review modul CLiKC! terkait Protokol Montreal
      (2) Pengembangan observatorium data tentang penipuan kepabeanan
      (3) Alat predictive analytics
      (4) Laporan statistik dan analitik tentang kondisi terkini administrasi kepabeanan

      Jika pendanaan tidak diperoleh hingga akhir periode, proyek akan ditunda ke siklus berikutnya.
   b. Draft Rencana Strategis 2025–2028 masih disusun, dengan fokus utama:
      (1) Penyempurnaan visi, misi, nilai inti organisasi
      (2) Penajaman prioritas dan struktur
      (3) Tiga tujuan strategis utama: memfasilitasi perdagangan sah, memastikan pemungutan penerimaan yang adil, melindungi masyarakat

V. Modernisasi WCO: perkembangan terkini dari tiga elemen Modernisasi WCO, yaitu: (1) proses pengangkatan dua Direktur baru; (2) restrukturisasi organisasi; dan (3) pelaksanaan Rencana Modernisasi yang mencakup alokasi sumber daya untuk membentuk atau memperkuat fungsi-fungsi yang dianggap perlu guna meningkatkan kinerja Organisasi.

VI. Tindak Lanjut Rekomendasi Tertunda: Dari 48 rekomendasi, 2 dihapus dengan pertimbangan biaya/manfaat dan prioritas lain sehingga tersisa 46. Sebanyak 20 berasal dari audit keamanan siber dengan rencana lima tahun. Mayoritas ditindaklanjuti pada 2025, sisanya (keamanan siber) pada 2026

VII. Tindak Lanjut Pemetaan Risiko dan Rencana Audit: Keputusan atas Audit Eksternal dan Internal 2025/2026:
   a. Audit eksternal terkait risiko WCO belum mampu mengumpulkan dan memanfaatkan data secara optimal (Risiko 9); dan
   b. Audit internal terkait risiko kurang tepatnya penentuan prioritas topik kerja (Risiko 16).

VIII. Kebijakan Pendanaan Donor: Sekretariat mempercepat pembaruan Kebijakan Pendanaan Donor agar selaras dengan Rencana Strategis dan proses modernisasi, termasuk penyesuaian struktur organisasi dan penambahan posisi Project Management Officer. Bahasa kebijakan juga diperjelas untuk merujuk secara akurat pada aturan internal.

Documents:
spo898e (dok PC)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

1. Indonesia merupakan anggota Audit Committee pada tahun 2022-2024 mewakili Asia Pasifik sehingga memiliki kesempatan untuk langsung membahas dan memberi masukan langsung untuk perbaikan tata kelola keorganisasian WCO.
2. Perlu untuk terus mengikuti diskusi dan perkembangan Rencana Modernisasi WCO 2024/2025. Mencatat hasil Pertemuan ke-19 Komite Audit, termasuk temuan, rekomendasi, serta tindak lanjut yang telah disepakati dan akan dilaporkan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya.
3. Mendukung upaya perbaikan tata kelola, penguatan pengendalian internal, dan keselarasan kebijakan strategis WCO sebagaimana dibahas dalam pertemuan dimaksud

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Take note

- **WCO Modernization Implementation – Progress Report**

<Chairperson of the Council to lead>

Keterangan:

1. WCO *Modernization Plan* merupakan salah satu inisiatif utama dalam rangka meningkatkan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, efisiensi WCO, serta menjadikan WCO sebagai organisasi modern yang mampu menghadapi tantangan saat ini maupun di masa depan.
2. Sekretariat WCO mulai mengimplementasikan tiga unsur Modernisasi WCO, yaitu: (1) proses penunjukan dua Direktur baru; (2) restrukturisasi organisasi; dan (3) pelaksanaan Rencana Modernisasi yang mengidentifikasi sumber daya guna membangun fungsi-fungsi penting guna meningkatkan kinerja organisasi. Laporan kemajuan sebelumnya disampaikan pada Sidang ke-91 Policy Commision (Desember 2024).
3. Aspek pendanaan implementasi bertahap Modernization plan telah dibahas pada Sidang ke-110 Finance Committee (31 Maret–1 April 2025). Finance Committee setuju mempertimbangkan biaya untuk modernization plan tersebut dalam pembahasan anggaran 2025/2026
4. **Progress**:

Appointment Two Directorate:

- Rencana Modernisasi menetapkan dua Direktorat baru yaitu Directorate Policy and Standards dan Directorate Implementation and Capacity Development menggantikan tiga Direktorat lama yaitu Directorate Capacity Building, Tariff and Trade Affairs, dan Enforcement and Facilitation.
- Terdapat enam tahap appointment director yaitu: (1) Menetapkan profil dan persyaratan jabatan (disahkan Policy Commission), (2) Menerbitkan pengumuman lowongan, (3) Seleksi awal (shortlist) oleh Vice-Chairs, (4) Wawancara/asesmen oleh Sekretariat WCO, (5) Seleksi akhir oleh Sekjen, (6) Pelaporan hasil kepada Vice Chair dan pengumuman kepada Anggota WCO
- Hasil akhir: Sekjen menunjuk Gael Grooby (Australia) sebagai Directorate Policy and Standard dan Isolde Murphy (Inggris**)** sebagai Directorate Implementation and Capacity Development; kedua pejabat akan mulai bertugas Juli 2025
- Posisi Direktur di struktur WCO yang baru menekankan kompetensi untuk mengatasi fragmentasi organisasi dan meningkatkakan kinerja

Organizational Arrangements:

- Restrukturisasi dirancang untuk mengoptimalkan tenaga kerja, menciptakan efisiensi, dan membangun sinergi. Staf dari tiga Direktorat lama dipindahkan ke dua Direktorat baru
- Langkah-langkah administrasi yaitu pembaruan kontrak, rekrutmen Kepala Unit baru, pembentukan *Project Management Office (PMO*) dan *Stakeholder Engagement Office,* serta Penyesuaian SOP dan pelatihan kepemimpinan

- Pengelolaan keberagaman pegawai (kepabeanan dan non kepabeanan) serta penempatan pegawai sesuai keahlian bidangnya.

Initiative Modernization Plan:

- Berdasarkan diagnosa organisasi, *Modernization Plan* mencantumkan inisiatif untuk menutup kelemahan dan membangun kapabilitas, dilakukan selama bertahap selama tiga tahun demi menjaga kehati-hatian fiskal. Anggota juga meminta pemanfaatan *Technical Attachés (TA)* sebisa mungkin guna memenuhi kebutuhan SDM tambahan
- Status Pos Baru (hasil finance committee)

Posisi	Status 2025/2026
TO PMO (Lead)	Diusulkan dalam anggaran 2025/2026
TO PMO	Diisi TA
TO Stakeholder Engagement (Lead)	Diusulkan dalam anggaran 2025/2026
TO Performance Measurement	Ditunda
TO Regionalization	Ditunda
TO Strategic Foresight	Potensial TA
B-grade Communication (2)	1 diisi TA; 1 ditunda
B-grade HR	Diusulkan dalam anggaran 2025/2026
B-grade IT Developer	Ditunda

5. **Financial Sustainability**: Financial Committee menyetujui pengeluaran belanja modernisasion plan difokuskan pada efisiensi dan transparansi (optimalisasi TA dan pengisian kebutuhan pegawai untuk mendukung modernisasi (TO PMO, TO SEO, Head HR)
6. **Regional Entities dan alignment strategic plan**: penguatan kerangka kerja regional dan memastikan keseimbangan antara otonomi regional dan efisiensi organisasi. Memastikan keselarasan Strategic plan dengan modernization plan.

***The Council* diundang untuk:**

- mencatat hasil laporan progress WCO Modernization Plan
- memberikan panduan kebijakan tambahan, jika diperlukan

Docs:
SP0891Ea (dok PC)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

1. DJBC mengapresiasi pelaksanaan WCO Modernization plan
2. DJBC mendukung perubahan struktur organisasi WCO yang dilakukan dengan tambahan dukungan sumber daya manusia *Project Management Office* & *Stakeholder Engagement Office* diharapkan dapat mengkoordinasikan proyek secara terpusat dan memperbaiki *stakeholder engagement* dalam masa *modernization* plan
3. DJBC mendukung langkah Sekretariat WCO dengan memanfaatkan TA yang pembiayaan berasal dari negara anggota sebagai langkah mengurangi beban Finansial.
4. DJBC menekankan pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan tanggung jawab objektivitas WCO dalam pengelolaan kontribusi negara anggota dan pengelolaan dana donor dari negara anggota.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Honourable Chair of the Council,

Indonesia commends the significant progress achieved under the WCO Modernization Plan. We fully support the Organisation's decision to revitalise its structure through the establishment of a Project Management Office and a Stakeholder Engagement Office, both of which will reinforce centralised project coordination and foster more effective stakeholder involvement throughout the modernisation phase.

Moreover, we appreciate the Secretariat's initiative to deploy Technical Attachés funded by Member administrations as a prudent measure to ease the Organisation's financial burden. We underscore the continuing need for close collaboration, seamless coordination, and rigorous objectivity and accountability in the management of Member contributions and donor funds. Indonesia stands ready to contribute constructively to ensure transparent financial governance and the sustained success of the WCO's modernisation agenda.

We reaffirm our support for the modernization efforts.

- **WCO *Strategic Plan* 2025-2028**

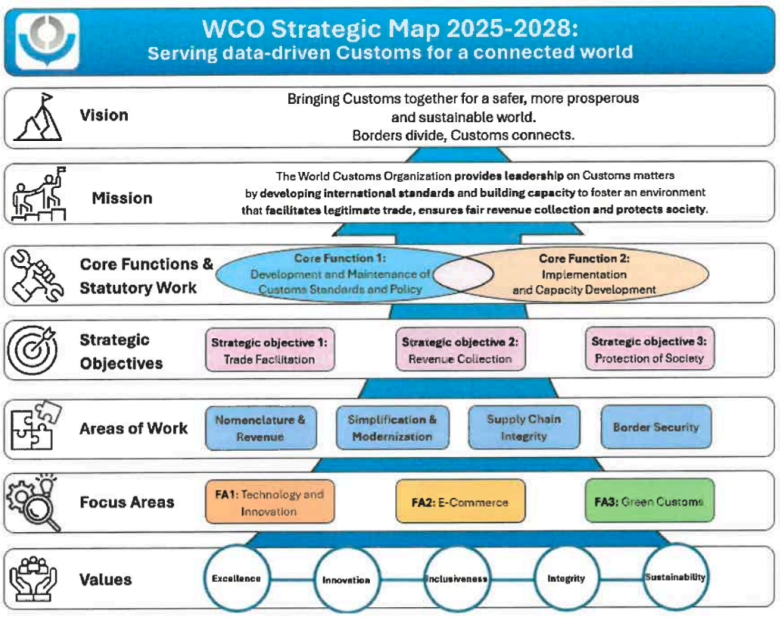
<Chairperson of the Council to lead>

Keterangan:

1. Update on the prioritization assignment
   a. WCO mengembangkan metodologi penentuan prioritas dalam Rencana Strategis 2025–2028, di mana kegiatan dibagi menjadi 3 tier:
      - i. Must Do: mandate konvensi, ada kewajiban hukum; aktivitas yang berkaitan dengan perjanjian internasional (WTO TFA, UNSCR, MEA)
      - ii. Should Do: terkait Focus Area, non-binding instruments yang punya dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, punya dampak global
      - Could Do: mendukung ketentuan tidak mengikat, terkait topik umum atau topik di mana Customs bukan lead
   b. Kriteria yang menjadi pertimbangan: (a) ketersediaan resources (cost); (b) tingkat interest Member; (c) perjanjian kerja sama dengan organisasi lain; (d) risiko reputasi; (e) benefit; (f) dampak negatif pada aspek lain; (g) update terakhir instrument; (h) studi sebelumnya tentang topik spesifik
   c. Kegiatan yang diusulkan untuk deprioritisasi:
      - Border security: update COPES Standards

- Nomenclature & Revenue: Ad-hoc technical advice; amandemen brosur HS Nomenclature; HS Alphabetical Index
- Simplification & modernization: update CBM compendium; Update Glossary of International Customs Terms; GNC; Railway Guidelines
- Supply chain integrity: cultural heritage; WCO Information & Intelligence Centre; IRIS; Commercial Fraud Observatory
- Implementation Support: leadership & management development; ad-hoc workshop request; human resources, small island economies

2. Proposed Draft Strategic Plan 2025-2028
   a. WCO telah menyusun Draft rencana strategis periode 2025-2028 yang telah didiskusikan dalam pertemuan Policy Commission (Desember 2024), Audit Committee (Februari 2025) dan Finance Committee (Maret 2025)
   b. Prinsip Strategic Plan:
      - Relevan & Adaptif - Menjaga relevansi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global.
      - Fokus & Prioritas - Mengoptimalkan sumber daya melalui penyelarasan dan penetapan prioritas strategis.
      - Dampak & Visibilitas - Meningkatkan transparansi, komunikasi peran Bea Cukai, dan keterlibatan pemangku kepentingan.



Docs:

SP0892e Agenda Item XVI a (dok PC)

SP0893e Agenda Item XVI b (dok PC)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

Update on prioritization agreement

a. Mengapresiasi WCO dalam penyusunan prioritas
b. Mendukung metodologi dan kriteria pertimbangan penetapan prioritas
c. Mekanisme penyaringan terhadap kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan memperkuat dasar pengambilan keputusan berbasis dampak, efisiensi biaya, dan relevansi
d. WCO perlu mempertimbangkan kembali usulan deprioritisasi support ke Small Island Economies

Strategic Plan 2025-2028

a. Mengapresiasi upaya Sekretariat dalam penyusunan Strategic Plan dengan melibatkan Negara Anggota secara aktif melalui konsultasi regional
b. Mendukung modernisasi dan upaya WCO dalam menetapkan prioritas strategis dan sesuai tugas utama WCO untuk membantu organisasi menggunakan sumber daya yang lebih fokus dan efisien
c. Mendukung peran Customs dalam rangka mewujudkan SDGs sebagaimana dituangkan dalam visi terbaru WCO

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Thank you Chair. Indonesia appreciates the WCO's efforts in establishing the prioritization methodology and the set of filtering criteria, which serve as a sound basis for strategic decision-making. We believe that the filtering mechanism applied to both ongoing and planned activities effectively strengthens impact-based, cost-efficient, and relevance-driven decision-making. This is essential to ensure the best use of limited resources while responding to Members' evolving needs.

While we understand the need for prioritization, we believe it may be worthwhile to revisit the suggested deprioritization, especially support to Small Island Economies. We would welcome further discussion on how continued engagement with these Members can remain aligned with WCO's inclusive approach.

a. Strategic Plan 2025-2028

Indonesia appreciates the WCO Secretariat's dedicated efforts in developing the Strategic Plan for 2025–2028. We recognize the critical role of Customs in advancing sustainability, as reflected in the new Vision, and we reaffirm our commitment to supporting this direction.

We furthermore support the endorsement of Strategic Plan and commend this initiative, as a well-structured and forward-looking Strategic Plan is essential to ensuring that the WCO's programs and resources are deployed in a focused, effective, and impactful manner—particularly in addressing both current and emerging challenges faced by Customs administrations worldwide.

Indonesia stands ready to collaborate with all Members in the effective implementation of the Strategic Plan.

SIGNING CEREMONIES AND DEPOSITING OF INSTRUMENTS

Keterangan:

Agenda merupakan kegiatan penandatanganan yang dilakukan oleh delegasi.

Action Required of The Council

-

Docs:
-

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):
Indonesia tidak memiliki agenda penandatanganan MoU.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):
Take Note

- **Implementation Plan 2025-2026**

<Chairperson of the Council to lead>

Keterangan:

1. Implementation Plan 2025–2026 adalah dokumen tahunan yang merealisasikan arah Strategis dari Strategic Plan 2025–2028 tahun pertama yang disusun sesuai tingkat prioritas.
2. Aktivitas dikelompokkan dalam tiga tingkat:
   a. Areas of Work – kategori tertinggi, terdiri dari enam area.
   b. Portfolios – sub-area dengan fokus tematik spesifik.
   c. Workstreams – kegiatan konkret/deliverables dalam tiap portfolio.
3. Semua usulan baru harus melalui proses filtering dan analisis prioritas yang bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kondisi global.
4. Tiga kategori tingkat prioritas:
   a. Kategori 1: Kegiatan wajib/statutory
   b. Kategori 2: Kegiatan pendukung
   c. Kategori 3: Kegiatan bernilai tambah
5. Kegiatan yang direncanakan:
   a. Border Security: Container Security; Drugs; Environmental Law Enforcement; Fragile Borders, Passenger Controls, Strategic Trade and Weapon Controls
   b. Nomenclature & Revenue: Nomenclature; Origin; Post-Clearance Audit; Valuation
   c. Simplification & Modernization: Coordinated Border Management; Customs Procedures; Data & Technology; Engagement of Trade Facilitation Stakeholders; Green Customs; Trade Facilitation Conventions; E-commerce
   d. Supply Chain Integrity: Anti-money laundering; Commercial Fraud; Risk Management/Intelligence; Secure Supply Chains
   e. Implementation Support: Curriculum Development & E-learning; Expert Management; Fellowship & Scholarship; Needs Assessment and Strategic Support; Performance Measurement
   f. Ethics & Inclusion: GED, Integrity

Documents:
SP0894e Agenda Item XVII (dok PC)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):
Mendukung endorsement Implementation Plan 2025-2026 dan berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan Negara Anggota untuk merealisasikan Strategic Plan.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):
Indonesia supports the endorsement of the Implementation Plan 2025–2026, which provides a concrete and structured approach to translating the Strategic Plan 2025–2028 into actionable priorities.

We view this plan as a valuable tool to guide our collective efforts, ensure efficient use of resources, and promote alignment with Members' needs and expectations.

In this regard, Indonesia reaffirms its commitment to strengthening cooperation with Members to ensure the successful implementation of the Strategic Plan and to deliver meaningful outcomes for the global Customs community.

We emphasize the importance of ensuring that the election processes at the WCO consistently uphold and promote gender equality, while also encouraging inclusive representation of all members within the organization. Furthermore, we support efforts to align election rules with current needs and consider various scenarios that may arise in the future.

- **Update to the format of the Council and Preliminary Research on Electronic Voting System <Chairperson of the Council to lead>**

Keterangan:

1. Pada Council Juni 2024, WCO Sekretariat telah mencoba format baru dalam pertemuan Council dengan menyelenggarakan sesi diskusi panel agar council lebih interaktif dan efektif.
2. Format breakout session juga diusulkan, namun terkendala keterbatasan waktu dan tempat.
3. Council bulan Juni 2025 akan menghadirkan 3 sesi diskusi panel dengan topik: Customs valuation, e-commerce dan new WCO Capacity-Building Paradigm.
4. WCO Sekretariat juga telah mengeksplor penggunaan teknologi untuk voting:
   a. Solusi Berbasis Perangkat Lunak (Software-Only)
   b. Add-On Terintegrasi dengan Hardware yang Ada
   c. Sistem Voting Mandiri (Standalone Hardware + Software)

Documents:

SP0896e Agenda Item XVIII b (dok PC)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

1. Mendukung format diskusi panel, namun perlu mempertimbangkan jumlah sesinya
2. Mengusulkan agar topik diskusi panel dapat didiskusikan dengan Negara Anggota terlebih dahulu dan perlu selaras dengan Strategic Plan, khususnya Focus Area
3. WCO mengedepankan prinsip konsensus dan jarang menggunakan mekanisme voting (kecuali pemilihan Sekjen dan Wakil Sekjen), sehingga diharapkan Sekretariat memprioritaskan hal lain yang lebih mendesak sesuai rencana modernisasi

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

*Thank you, Chair. Indonesia supports the use of **panel discussion formats** as part of the meeting structure, as they encourage dynamic and inclusive dialogue. We suggest that the **number of sessions be carefully considered** to ensure sufficient time and focus for each discussion. We also propose that the **topics for panel discussions be consulted in advance with Members**, and that they be **closely aligned with the Strategic Plan**, to ensure relevance and strategic coherence.*

Regarding electronic voting systems, Indonesia acknowledges the importance of exploring innovations to support WCO's governance. However, considering that the WCO operates primarily on the basis of consensus and that voting mechanisms are rarely used in practice, we believe it may be more appropriate for

the Secretariat to focus its efforts on other pressing priorities that are more directly aligned with the Organization's modernization agenda.

- **European Union concept Notes on WCO Regional Reform and WCO Sustainable Financing <Chairperson of the Council to lead>**

Concept Note on WCO Regional Reform

Latar Belakang:

1. Tidak ada pendekatan korporat atas peran dan tanggung jawab Vice-chair
2. Tidak ada standarisasi pengaturan entitas regional karena dibentuk dan dikelola secara independen oleh masing-masing wilayah
3. Penentuan perwakilan regional dilakukan secara independen dan tidak ada prosedur yang seragam antar wilayah, sehingga ada risiko ketimpangan representasi

Usulan EU:

- "WCO Regional framework": Menetapkan prinsip umum kerja sama, pembagian peran dan tanggung jawab wilayah, serta standar tata kelola, operasional, dan representasi regional yang harmonis
- "Concept on WCO Regional Cooperation": Memungkinkan pelimpahan tugas-tugas strategis kepada wilayah yang paling siap dan berpengalaman sebagai forerunner untuk mengoptimalkan kapasitas regional, memperkuat kolaborasi antarwilayah, mempercepat pelaksanaan Strategic Plan, dan mendorong hasil yang setara dalam implementasi standar WCO di seluruh kawasan

Concept Note on WCO Sustainable Financing:

Latar Belakang:

1. Lebih dari 80% anggota membayar kontribusi minimum yang jumlahnya sangat rendah sebesar 0,161% (EUR 26.604,36 per anggota untuk 2024/2025)
2. Ketergantungan besar pada kontribusi sukarela (60% dari total anggaran), sementara kontribusi wajib 40%.
3. Situasi pendanaan menjadi tidak stabil, tidak fleksibel karena bergantung pada donor
4. Tidak ada kerangka pengaturan yang kuat untuk memastikan kontribusi sukarela selaras dengan prioritas strategis WCO

Usulan EU:

1. Proposal 1: menerapkan mekanisme yang lebih transparan dan efektif untuk penghitungan kontribusi wajib, misalnya dengan cara:
   a. Menggunakan data ekonomi terkini atau indikator bea masuk sebagai dasar perhitungan kontribusi.
   b. Menaikkan kontribusi minimum tetap (misalnya dari 0,161% menjadi ≥0,3%), dan tetap menjaga batas maksimum 22%.
   c. Terapkan skema dua komponen:
      - Bagian tetap yang dibagi rata ke seluruh anggota.
      - Bagian proporsional berdasarkan ukuran ekonomi (seperti sistem OECD).
2. Proposal 2: Rebalancing Rasio Pendanaan WCO: Meningkatkan porsi kontribusi wajib sebagai pilar utama pendanaan, yang dapat dicapai melalui reformasi mekanisme perhitungan kontribusi (Proposal Pertama).
3. Proposal 3: Kerangka Regulasi untuk Kontribusi Sukarela

a. Menetapkan panduan tentang pengelolaan dan penyaluran kontribusi sukarela.
b. Dana diarahkan ke area prioritas, tugas inti, dan rencana implementasi tahunan WCO.

Docs:

Agenda Item XVIII c sp_concept_note_wco_regional_reform (dok PC)

Agenda Item XVIIIc sp_concept_note_wco_sustainable_financing (dok PC)

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

Concept Note on Regional Reform:

DJBC menyambut baik usulan EU terkait regional reform. Penyelarasan tata kelola regional perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan wilayah.

Concept Note on WCO Sustainable Financing:

- Pada TA 2024/2025, DJBC (Indonesia) membayar 70,510.75 euro atau sebesar 0.418%
- Untuk TA 2025/2026, kontribusi wajib DJBC naik menjadi 0.441% atau senilai 78,140.15 euro
- DJBC memahami perlunya sistem kontribusi yang lebih adil dan representatif, tetapi penyesuaian kontribusi wajib harus memperhatikan kemampuan negara anggota secara proporsional dan adil.
- DJBC mendukung pengembangan panduan atau regulasi khusus untuk kontribusi sukarela agar selaras dengan rencana strategis WCO, dan digunakan secara lebih seimbang di seluruh wilayah/regional

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Thank you EU for the proposal. We recognize the need for a more equitable and representative contribution system within the WCO. However, any adjustment to mandatory contributions should be made with careful consideration of Members' capacities, ensuring that the approach remains fair and proportionate. We also support the development of specific guidelines or regulations for voluntary contributions, to ensure alignment with the WCO Strategic Plan and promote a more balanced distribution of such contributions across all regions. Thank you.

AGENDA ITEM 7: Budgetary and Financial Matters

The 110th Session of the Finance Committee

<Chairperson of the Council to lead>

Keterangan:

1. ***110th Session of the Finance Committee***: Finance Committee dilaksanakan pada tanggal 31 Maret s.d 1 April 2025, dipimpin oleh Raju Boddu (Antigua dan Barbuda). Delapan belas anggota Komite berpartisipasi dalam Sesi tersebut.
2. **Financial Year 2024/2025**: **Receipt of Contributions and Capital Subscriptions**

   Komite mencatat situasi terbaru mengenai penerimaan kontribusi dan capital subscriptions. Dalam konteks ini, Chairperson mendorong para Anggota untuk membayar kontribusi mereka tepat waktu sesuai dengan peraturan Organisasi.

   Revision of staff emoluments and allowances

   - Skala gaji baru, disesuaikan sebesar +5,7% dibandingkan dengan skala gaji tahun 2024, direkomendasikan untuk Belgia oleh CCR berlaku mulai 1 Januari 2025
   - Kenaikan tunjangan terkait keluarga dan kenaikan Tunjangan Anak Ekspatriat yang direkomendasikan oleh CCR berlaku mulai 1 Januari 2025

   Revenue

The Finance Committee mencatat skala kontribusi sementara untuk tahun keuangan 2025/2026 dan menyetujui kenaikan 3.5% dalam kontribusi Anggota dan meminta Sekretariat untuk menyajikan versi final dari skala kontribusi kepada Dewan pada bulan Juni 2025, berdasarkan kenaikan 3.5% dalam kontribusi Anggota.

3. **WCO Modernization Plan-Implementation and Financing**

   The Finance Committee mencatat status terkini Rencana Modernisasi dan sepakat untuk mempertimbangkan usulan-usulan yang disampaikan, sesuai kebutuhan, dalam pembahasan usulan anggaran untuk tahun keuangan 2025/2026

4. **Customs co-operation fund and alternative sources of funding**

   The Finance Committe mencatat Laporan Tahunan tentang the Customs Co-operation Fund an informasi tentang sumber pendanaan alternatif serta mengucapkan terima kasih kepada para donor atas dukungan mereka yang berkelanjutan.

5. **Use of Organization's Reserves : Project Proposal – Enhancing the HS Framework**

   The Finance Committee mencatat prinsip umum bahwa pekerjaan inti harus dibiayai dari anggaran reguler; mendukung *Business Case* yang diusulkan untuk proyek **Enhancing the HS Framework** sebagai pengecualian; dan Sepakat merekomendasikan kepada Dewan agar pendanaan disediakan dari Cadangan

***The Council* diundang untuk:**

- Menyetujui bahwa hasil bersih untuk tahun anggaran **2023/2024 sebesar 1.588.986,12 euro** dan laba akumulasi serta Cadangan pada 30 Juni 2024 ditetapkan sebesar **8.587.137,86 euro**.
- Membebaskan Sekretaris Jenderal dari tanggung jawab keuangan untuk tahun keuangan 2023/2024;
- Menyetujui biaya operasional umum sebesar 19.904.698,41 euro untuk tahun 2025/2026;
- Menyetujui skala kontribusi WCO untuk tahun keuangan 2025/2026 dengan **peningkatan 3,5% dibandingkan tahun keuangan 2024/2025**;
- Menyetujui Tabel Staf untuk tahun 2025/2026
- Menyetujui **pengeluaran modal yang diusulkan sebesar 1.558.503 euro untuk tahun keuangan 2025/2026**;
- Mencatat pengeluaran tingkat tinggi dari Rencana Strategis;
- Menyetujui penerapan skala gaji baru seperti yang direkomendasikan oleh *Co-ordinated Organisations' Co-ordinating Committee on Remuneration* (CCR) yang berlaku mulai 1 Januari 2025;
- Menyetujui penyesuaian tunjangan keluarga dan Tunjangan Anak Ekspatriat yang direkomendasikan oleh CCR yang berlaku mulai 1 Januari 2025;
- Mengadopsi amandemen yang diusulkan untuk Manual Staf, Manual Atase Teknis, dan Manual untuk Kontraktor Jangka Pendek;
- Mengadopsi Laporan *Finance Committee* ke-109.

Docs:

SC_Chairperson_Report_Finance_145.pdf

SF0679Eb

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

- Indonesia menyetujui Laporan Finance Committee ke-109.
- Indonesia bukan merupakan anggota *Finance Committee*.
- Pembayaran kontribusi Indonesia pada FY 2024/25 dengan persentase 0,418 (UN scale contribution) total 70.510,75 Euro

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):
Take note

AGENDA ITEM 8: *Other Business*
Presentation to winner of photo competition
<Chairperson of the Council to lead>



Indonesia telah berpartisipasi dan mengirimkan foto melalui surat nomor S-60/BC/2025 tanggal 8 Mei 2025 ke Sekretariat WCO.

Foto yang dikirimkan berjudul "*Fair Winds and following Seas"* dipotret oleh Rizki Putra Agusta.

Informasi tambahan:

Pada tahun 2024, Indonesia berpartisipasi dengan mengirimkan foto melalui surat nomor S-141/BC/2024 tanggal 13 Mei 2024 ke Sekretariat WCO.

Foto yang dikirimkan berjudul "*Forging Stronger Bonds: Indonesian Customs Empowering Industries for Growth"* dipotret oleh Rizki Putra Agusta



Pemenang event ini pada tahun 2024 adalah negara Norway "Snow Mobile Patrol"



Pemenang event ini pada tahun 2023 adalah negara Algeria "On All Fronts"



Doc:

Penyampaian The WCO 17th Annual Photo Competition

Indonesia_WCO_Photo_Competition_2025_Entry_Form.

Photo_DGCE

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

Indonesia perlu memilih salah satu foto negara anggota WCO untuk voting pemenang lomba foto dimaksud.

Ketentuan voting foto tidak diperbolehkan memilih foto dari negara sendiri.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

-

AGENDA ITEM 9: *Elections*
<Chairperson of the Council to lead>

Keterangan:

Terdapat pemilihan untuk beberapa posisi antara lain:

a. *Chairperson of the Council*
b. *Vice-Chairperson of the Council*
c. *Members of the Policy Commission*
d. *Members of the Finance Committee*
e. *Chairperson and Vice-Chairperson of the Finance Committee*
f. *Members of the Audit Committee*
g. *Chairperson and Vice-Chairperson of the Audit Committee*

Docs:

-

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

Indonesia ditetapkan menjadi anggota *Policy Commission* periode 2024-2026.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Thank you, Chairperson, for the opportunity.

On behalf of my country, Please be rest assured, you will have the support of Indonesia to achieve our common goal and we look forward to cooperating with you in the future.

AGENDA ITEM 10: ***Date and place of next sessions of the Council and Calendar for Committee sessions and other meetings (1 July 2025 - 30 June 2026)***
<Chairperson of the Council to lead>

Keterangan:

1. Dokumen ini berisi tanggal dan tempat sidang-sidang berikutnya dari Dewan dan Kalender untuk sidang-sidang Komite dan rapat-rapat lainnya (periode 1 Juli 2025 - 30 Juni 2026).
2. Council Sessions ke- 145/146 mendatang akan diselenggarakan pada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2026.

Docs:

SG0233e

Posisi (jika perlu, menyesuaikan):

Indonesia take note atas kalender WCO periode 1 Juli 2025 - 30 Juni 2026 dan tidak perlu menyampaikan intervensi secara lisan.

Suggested Intervention (jika perlu, menyesuaikan):

Take Note